

**DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN  
SUTAN SJAHRIR 1945 – 1947**



**Giovanironi Jeremy**  
**4415122331**

Skripsi Ini Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**2017**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister, dan atau doktor) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dari hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini.
5. Serta sanksi lainnya yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



(Giovanironi Jeremy)

NIM. 4415122331

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Ilmu Sosial

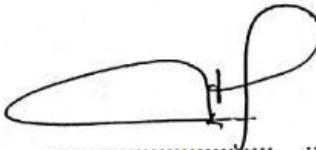
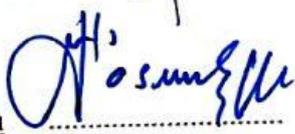
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si

NIP. 196304121994031002

### TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dr. Abdul Syukur, M.Hum</u> NIP. 19691010200501102 Ketua		16/8 2017
2.	<u>Nur'aini Martha, S.S, M. Hum</u> NIP. 197109222001122001 Sekretaris		16/8 2017
3.	<u>M. Hasmi Yanuardi, S.S, M.Hum</u> NIP. 197601302005011001 Anggota/Penguji Ahli		16/8 2017
4.	<u>Drs. M. Fakhruddin, M.Si</u> NIP. 196505081990031005 Anggota/Pembimbing I		16/8 2017
5.	<u>Humaidi S.Pd, M.Hum</u> NIP.198112192008121001 Anggota/Pembimbing II		16/8 2017

Tanggal Lulus: 7 Agustus 2017

## ABSTRAK

**Giovanironi Jeremy**, *Dinamika Politik Kabinet Sutan Sjahrir*. Skripsi. Jakarta : Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data seputar peristiwa politik yang terjadi pada masa pemerintahan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama antara tahun 1945-1947. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan dan dampak peristiwa politik nasional di awal masa kemerdekaan Indonesia dengan berjalannya kabinet Sjahrir.

Dari data ini maka diketahui bahwa ada beragam jenis peristiwa politik yang terjadi pada masa awal kemerdekaan, mulai dari yang bersifat diplomatik, hingga berujung pada pertempuran berdarah seperti halnya yang terjadi di Surabaya, Ambarawa, Bandung, dan Jakarta.

Selain itu diketahui pula bahwa kabinet Sjahrir memang memiliki banyak program politik nasional seperti penstrukturan birokrasi daerah, dan normalisasi mata uang. Namun karena keadaan yang genting dan dibawah bayang – bayang pendudukan militer oleh sekutu, kabinet memaksimalkan kinerjanya pada bidang diplomasi.

Selain itu, terjadi pula pertikaian di dalam birokrasi pemerintahan sebagai akibat dari kebijakan diplomasi tersebut, yang kemudian menjatuhkan kabinet sjahrir dan menyulut pertikaian dalam koalisi politik Persatuan Perjuangan. Pada akhirnya Sjahrir kehilangan konsesi dan pengaruh politiknya, dan semenjak kegagalan kabinet ketiganya, menjadi penonton di pinggir gelanggang politik.

Dengan demikian disimpulkan bahwa pemerintahan Sjahrir memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membentuk fondasi diplomasi internasional Indonesia, namun memiliki kekurangan dalam proyek nasional yang disebabkan oleh kesibukan hampir semua elemen perjuangan bangsa untuk mengusir penjajah.

## **ABSTRACT**

**Giovanironi Jeremy**, Political Dynamics of Sutan Sjahrir Cabinet, 1945-1947. Mini Thesis. Jakarta : Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta. 2017

This research aim to collect data about political occurrence during the time of the governance of Sutan Sjahrir as the first Prime Minister of Republik Indonesia during 1945 – 1947. This research also aim to explain the connection and impact of national political occurrence during the early era of Indonesian independence with Sjahrir’s cabinet.

From this data it is known that there are variety of political occurrence in the early independence era, starting from the diplomatic and goes to bloody tragedy such that happens in Surabaya, Ambarawa, Bandung, and Jakarta.

Beside that it is also known that Sjahrir’s cabinet also have national political program such as regional bureaucracy restructurisation, and currency normalisation. But, because of the danger of the military situation and imminent possibility of Allied military occupation, the cabinet is forced to maximized their efforts in diplomacy.

Also, there are clash on the government bureaucracy that were caused by the same diplomacy policy that were practiced by the cabinet, which in turn destroy Sjahrir cabinet and ignites political conflict inside the biggest opposition group “Persatuan Perjuangan”. In the end, Sjahrir lose his political concession and influence. Since the failure of his third cabinet, Sjahrir became a mere spectator on national politics.

In conclusion, Sjahrir’s cabinet government bring significant impact in forming the foundation of Indonesia international diplomacy, but also have weakness on national project which caused by the different focus of every governmental element on the issue of diplomacy.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah bisa dimenangkan*

- Sutan Sjahrir -

*Proses adalah segalanya, hingga pada akhirnya, tujuan akhir bukanlah apa - apa*

-Eduard Bernstein-

*Keringat menyelamatkan darah, darah menyelamatkan nyawa, akan tetapi berpikir menyelamatkan keduanya*

-Erwin Rommel-

*Skripsi ini kupersembahkan untuk orangtuaku yang berkorban demiku, kekasihku yang selalu menyemangatiku, Malaikatku Caco, dan Bung Sjahrir, yang ide dan pengorbanannya akan terus diingat*

---

---

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika politik pemerintahan Sutan Sjahrir 1945-1947 ”. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, pengarahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Abdul Syukur, M.Hum selaku koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Drs. M.Fakhrudin, M.Si selaku Dosen Pembimbing pertama atas arahan, ketelitian, motivasi dan kesabaran hati selama membimbing peneliti.

Humaidi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, bantuan, motivasi dan saran kepada peneliti. Drs. Wisnubroto, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan banyak saran dan bantuan selama penulis berkuliah di UNJ. M. Hasmi Yanuardi, S.S. M.Hum selaku Dosen Penguji Ahli yang telah banyak bersabar dan memberikan saran berguna bagi peneliti, serta Nuraini Martha, S.S, M. Hum selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan saran, motivasi, dan kesabaran dalam menguji hasil penelitian ini

Terima kasih terutama juga saya berikan pada mama tersayang Nilawati yang telah dengan tulus ikhlas dan sabar membimbing, menyalangi, dan membiayai segala pendidikan dan kebutuhan hidup yang tanpa dirinya, peneliti tak akan mampu menyelesaikan penelitian dan perkuliahan ini.

Teman-teman satu almamater, Sejarah Angkatan 2012, yang selalu memberi semangat dan motivasi selama perkuliahan. Teman-teman sepermainan dan seperjuangan seperti Renaldy Iqramullah, Citra Putri, Nicky Audina, Zulkifli Pelana, Michael Tamboch, Siti Rabiatul, dan Ayu Regina yang telah memberikan semangat dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi.

Terkhusus diberikan rasa terimakasih dan sayang yang sangat mendalam kepada Damayanti Junaedi yang banyak berkorban demi peneliti, mulai dari

berkorban waktu, biaya, dan ketabahan serta kesabarannya selama menunjang perkuliahan dan penelitian yang ditempuh oleh peneliti.

Terimakasih pula ditujukan peneliti kepada sahabat setia Mue, Embul, Utih, almarhum Caco dan Caca, Seato, Bobo, Nene, Ting, Enoh, Felix, Lilly, Muo, Cio, Miu, Nato, Kitler, Cio II, dan Mio yang selama penulisan skripsi ini memberikan semangat dan moral tambahan untuk peneliti melalui tingkah lucunya.

Terakhir saya haturkan sedalam – dalamnya terimakasih terhadap seluruh dosen dan admin program pendidikan sejarah yang tak lelah memberikan masukan, bantuan, ide, dan yang paling penting, ilmu yang tak ternilai harganya untuk peneliti.

Jakarta, Juli 2017

GJ

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Tujuan Penelitian.....	13
C. Kegunaan Penelitian.....	14
D. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Bahan Sumber.....	16
<b>BAB II AWAL PEMERINTAHAN SUTAN SJAHRIR SELAMA REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA</b>	
A. Pembentukan Kabinet Sjahrir yang Pertama.....	20
B. Hubungan Awal Militer dan Kabinet.....	30
C. Mengontrol Gerakan Pemuda.....	40
D. Republik Mundur dari Jakarta.....	44
E. Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan.....	51
<b>BAB III DAMPAK PERKEMBANGAN POLITIK NASIONAL PADA PEMERINTAHAN SUTAN SJAHRIR</b>	
A. Kejatuhan Kabinet Pertama.....	66
B. Mandat Kedua Sjahrir dan Krisis Maret 1946.....	72
C. Kudeta, Linggarjati, dan Akhir Karier Pemerintahan Sjahrir.....	82

BAB IV KESIMPULAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN .....	96

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sutan Sjahrir Muda.....	96
Lampiran 2.Sutan Sjahrir Bersama Presiden Soekarno dan Wapres Hatta .....	97
Lampiran 3.Amir Sjarifuddin dan Sutan Sjahrir.....	98
Lampiran 4. Perdana Menteri Sjahrir dan Jenderal Sudirman.....	99
Lampiran 5.Pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima TKR .....	100
Lampiran 6.Sutan Sjahrir diapit Jenderal Christison dan Van Mook.....	101
Lampiran 7.Prof. Schermerhorn berjabat tangan dengan Sjahrir.....	102
Lampiran 8.Tan Malaka, Pemimpin Persatuan Perjuangan.....	103
Lampiran 9.Geheim Archief No. 19 .....	104
Lampiran 10.AD-ART Pesindo .....	105
Lampiran 11.Perppu No. 2 & No. 3 Tahun 1945.....	106
Lampiran 12.The Mercury, 24 Maret 1947, Indonesia to Sign Agreement.....	107
Lampiran 13.The Examiner 5 Feb 1946, Test for Sjahrir Government.....	108
Lampiran 14.The Daily Mercury 15 Maret 1946, Tan Malaka .....	109
Lampiran 15.The Examiner 29 Maret 1946, Extrimist Purge by Sjahrir.....	110
Lampiran 16.The Advocate 2 Juli 1946, Sjahrir Released! .....	111
Lampiran 17.The Northern Star 5 Maret 1946, Sjahrir Resigned.....	112
Lampiran 18.The Northern Star 28 Des 1945, Narrow Escape for Sjahrir.....	113
Lampiran 19.Cootamundra Daily Herald 29 Nov 1946, Declaration .....	114
Lampiran 20.Daftar Menteri Kabinet Sjahrir Pertama 1945-1946 .....	115
Lampiran 21.Daftar Menteri Kabinet Sjahrir Kedua Maret – Oktober 1946 ..	116
Lampiran 22.Daftar Menteri Kabinet Sjahrir Ketiga 1946-1947.....	117

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kondisi perpolitikan Indonesia pada awal kemerdekaan bisa dikatakan cukup pelik. Keadaan masyarakat dan keberadaan sisa kekuatan bala tentara Jepang membuat keamanan di Indonesia sangat tidak stabil. Namun, dalam keadaan yang demikian, para pemimpin perjuangan Indonesia masih sanggup untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan menyusun badan – badan pemerintahan nasional.

Jalan yang ditapaki oleh pemerintahan pertama Republik Indonesia bukanlah jalan yang mulus. Selain masih harus berurusan dengan kekuatan Jepang di Nusantara, pemerintah juga menghadapi masalah baru berupa kedatangan tentara sekutu yang bertujuan untuk melucuti tentara Jepang yang baru saja kalah perang.

Pada awalnya tidak terjadi banyak masalah dalam komunikasi antara sekutu dengan pemerintah republik. Sekutu yang tidak ingintugas - tugasnya terhambat, setuju untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto*. Namun keadaan berubah ketika pemerintah republik mengetahui bahwa Belanda ikut dalam rombongan pasukan sekutu di Indonesia. Keadaan memanas antara kedua belah pihak yang dibuktikan oleh beberapa

pertempuran yang terjadi antara kedua belah pihak di Semarang, Ambarawa, dan puncaknya di Surabaya. Selain itu, kekerasan terhadap warga sipil yang dianggap pro-Belanda terutama golongan Indo dan Tionghoa makin bertambah parah.<sup>1</sup>

Dalam keadaan yang genting tersebut, muncul suara – suara yang menginginkan berdirinya sebuah pemerintahan yang bersih dari unsur Jepang dan fasisme. Suara – suara tersebut menuduh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta sebagai kolaborator Jepang karena karir mereka sebagai corong propaganda semasa pendudukan Jepang.<sup>2</sup>

Tak lama sesudah tuduhan tersebut, Sutan Sjahrir, pada saat itu menjabat ketua Komite Nasional Indonesia Pusat<sup>3</sup>, menuliskan sebuah pamflet yang berjudul *Perjuangan Kita*. Pamflet tersebut kemudian menjadi salah satu alasan dukungan kuat kepada Sjahrir dari pihak KNIP agar dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan ditugasi untuk membentuk sebuah pemerintahan untuk menghadapi pihak sekutu dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Lalu, siapakah Sutan Sjahrir ini?

Sutan Sjahrir dilahirkan pada tanggal 5 Maret 1909, di Padang Panjang, Sumatera Barat. Berasal dari keluarga pegawai negeri, Sjahrir bisa dikatakan mendapatkan kesempatan belajar yang cukup luas dan

---

<sup>1</sup> Rosihan Anwar. 1980. *Mengenang Sjahrir*. Jakarta : Gramedia, h. 15.

<sup>2</sup> Yang diduga datang dari kelompok pro-Sjahrir. Lihat karya Benedict R.O.G. Anderson, *Revoloesi Pemoeda; Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. h. 192.

<sup>3</sup> Lembaga Legislatif pada masa tersebut di Indonesia

modern.<sup>4</sup> Ayahnya yang merupakan seorang jaksa pengadilan adalah orang yang terdidik, sementara ibunya adalah keturunan bangsawan Mandailing, Tuanku Besar Si Intan.<sup>5</sup>

Sjahrir tidak lama tinggal di Padang Panjang. Profesi sang ayah yang mengharuskannya berpindah tempat kerja membuat Sjahrir pun harus ikut berpindah pindah. Setelah sempat tinggal di Jambi, ayahnya mendapatkan pekerjaan sebagai Kepala Jaksa di Pengadilan Tinggi Medan. Di kota inilah, Sjahrir tinggal cukup lama dan memulai pendidikannya.<sup>6</sup>

Seusai pendidikan dasarnya (via ELS dan MULO) di Medan, Sjahrir kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas ke Jawa dengan mendaftar pada *Algemeene Middelbare School* (AMS) Bandung. Sama seperti ayahnya ketika sekolah, Sjahrir mengambil Jurusan Barat Klasik.<sup>7</sup>

Semasa sekolah di Bandung, Sjahrir terkenal sebagai seorang yang memiliki pemikiran kritis namun bersahabat dalam sikap. Hal tersebut akan berpengaruh pada sikap nasionalisme Sjahrir di kemudian hari. Sikap nasionalisme Sjahrir pertama kali tumbuh setelah mendengar pidato Dr. Cipto Mangunkusumo di alun-alun Bandung. Usai mendengarkan pidato tersebut,

---

<sup>4</sup> Rudolf Mrazek. 1996. *Sjahrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, h. 4-5.

<sup>5</sup> Rosihan Anwar. 2010. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta : Kompas, h. 3-9.

<sup>6</sup> Lukman Santoso Az. 2014. *Sutan Sjahrir*. Yogyakarta : Palapa, h. 15.

<sup>7</sup> Lukman Santoso Az. *Ibid.*, h. 18.

Sjahrir mulai aktif dalam perkumpulan pemuda dan ikut mendirikan *Jong Indonesie*. Aktifitas ini membuat Sjahrir sering dimata–matai oleh polisi.<sup>8</sup>

Usai menamatkan sekolahnya, Sjahrir kemudian melanjutkan studinya ke Belanda. Sjahrir mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam (Gemeente Universiteit van Amsterdam). Kehidupan di Belanda yang jauh lebih bebas daripada di Hindia membuatnya lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kampus daripada belajar. Selama di Amsterdam, Sjahrir menumpang tinggal di flat kakaknya Siti Sjahruzah yang sedang menemani suaminya Djoehana Wiradikarta yang berkuliah di bidang kedokteran di Amsterdam.<sup>9</sup>

Pergaulan di luar kelas membuat Sjahrir dekat dengan pemuda – pemudi kiri<sup>10</sup> di Belanda, tak lama Sjahrir sendiri semakin gandrung belajar tentang berbagai aliran kiri, mulai dari Sosialisme, Komunisme, bahkan sampai Anarkisme. Seperti apa yang kemudian dikatakan Rosihan Anwar, “Sjahrir terkena dampak *zeitgeist* atau semangat zaman yang melanda Eropa

---

<sup>8</sup> Tim Tempo. 2010. *Sjahrir : Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta : Tempo & KPG, h. 9-11.

<sup>9</sup> Rosihan Anwar. 1980. *Mengenang Sjahrir*. Jakarta : Gramedia, h. 36.

<sup>10</sup> Menurut Marcel Gauchet, kemunculan istilah kiri–kanan dalam dunia politik berawal dari posisi duduk para legislator Perancis dalam sidang dewan pada masa Revolusi Perancis. Legislator yang duduk disebelah kiri merupakan orang – orang progresif yang anti kerajaan dan pro republik. Sementara Legislator di sebelah kanan merupakan pendukung kerajaan yang cenderung ultra konservatif. Divisi ini terus berlanjut pada masa – masa berikutnya hingga berkembang menjadi golongan sosialis yang progresif dalam masalah keadilan sosial berada di spectrum kiri dalam spectrum politik, dan golongan kapitalistik yang konservatif dalam masalah hak keadilan sosial berada pada spectrum kanan. Sehingga dengan demikian, kiri dalam tulisan ini merujuk pada Sosialisme (termasuk didalamnya Sosial Demokrat, Sosialis Liberal, dan wujud ekstrim Sosialisme seperti Komunisme). Lihat tulisan Marcel Gauchet dalam karya Pierre Norra dan Lawrence D. Kritzman (1997), *Realms of Memory : Conflict and Division* h. 242-249, serta karya Seymour M. Lipset (1960), *Political Man, The Social Bases of Politics*, h. 222.

pasca Perang Dunia I”, dengan demikian Sjahrir terbawa dalam gelombang arus gerakan sosialis yang makin berkembang pasca rubuhnya Kekaisaran Jerman.<sup>11</sup>

Selama masa – masa itu juga Sjahrir akrab dengan pasangan suami isteri, Solomon Tas dan Maria Duchateau. Tas adalah ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat yang berafiliasi dengan Partai Sosial Demokrat Belanda, sementara Duchateau adalah aktivis Sosialis. Beberapa tahun kemudian Duchateau bercerai dengan Tas, dan menikah dengan Sjahrir.

Setelah keluarga Dr. Djoehana pulang ke Hindia, Sjahrir kemudian menumpang tinggal di rumah keluarga Solomon Tas. Tak lama setelah itu, Sjahrir memutuskan untuk pindah sekolah ke Leiden dengan mendaftarkan dirinya pada Program Studi Indologi. Selama berstudi di Leiden, Sjahrir menyokong hidupnya dengan bekerja pada Federasi Buruh Transportasi Internasional.<sup>12</sup>

Selama masa studi barunya tersebut, Sjahrir makin tertarik dengan pemikiran Sosialisme. Dalam pendalaman pengetahuannya tentang materi Sosialisme, Sjahrir bertemu dengan sesama mahasiswa pribumi yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi Rotterdam. Mahasiswa tersebut bernama Mohammad Hatta.

---

<sup>11</sup> Rosihan Anwar. 1980. *Ibid.*, h. 37.

<sup>12</sup> Lukman Santoso Az. *Op. Cit.*, h. 28

Keakraban diantara keduanya kemudian membuat Sjahrir merasa tertarik bergabung dengan organisasi yang sedang dipimpin oleh Hatta yang bernama Perhimpunan Indonesia (PI). Sjahrir kemudian dipilih sebagai sekretaris. Organisasi ini merupakan wadah bagi mahasiswa rantau dari Hindia untuk menyuarakan aspirasi dan saling mengenal satu sama lain.

Seiring dengan berkembangnya gerakan komunisme di Belanda, maka hal yang sama juga terjadi dalam tubuh PI. Golongan komunis yang dimotori oleh Roestam Effendi dan R. M. Abdul Madjid mengambil alih kepemimpinan PI dan mengeluarkan baik Hatta maupun Sjahrir karena dinilai kurang revolusioner.<sup>13</sup> Pada saat yang hampir bersamaan, datang kabar dari Hindia bahwa Partai Nasional Indonesia telah dibubarkan oleh pemerintah, dan para pemimpinnya ditangkap.

R.M. Sartono, salah seorang pemimpin PNI, membuat sebuah partai baru yang lebih moderat sebagai pengganti PNI yaitu Partindo. Namun tindakan ini tidak disetujui oleh Sjahrir dan Hatta. Untuk memperbaiki keadaan, pada tahun 1931 Hatta mengutus Sjahrir pulang ke Hindia. Setibanya kembali di Bandung pada Desember 1931, Syahrir langsung aktif dalam kegiatan partai. Pada tanggal 26 Juni 1932, Sjahrir terpilih sebagai ketua umum partai baru yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia itu,

---

<sup>13</sup> Rosihan Anwar. 2010. *Op. Cit.* H. 38-39 ; Hal ini terjadi karena baik Roestam Effendi maupun Abdul Madjid adalah penganut aliran Leninisme yang pada saat itu merupakan salah satu gerakan komunis ekstrem. Sementara baik Hatta maupun Sjahrir adalah penganut Sosialisme yang lebih kompromis dan moderat. Untuk lebih jelas lagi tentang perbedaan kedua pemikiran ini, lihat karya Adam Przeworski, *Capitalism and Social Democracy : Studies in Marxism and Social Theory* (1986), h. 329

untuk menghindari kecurigaan pemerintah, dan memaksimalkan potensi partai, Sjahrir mengubah haluan partai dari partai rakyat menjadi partai kader. Hal ini membuat keanggotaan partai tidak lebih dari 1000 orang saja.<sup>14</sup>

Namun giat propaganda yang dilakukan Sjahrir dan partai barunya itu mengundang perhatian pemerintah. Kembalinya Hatta usai menamatkan pendidikan yang disertai dengan bergabung ke Pendidikan Nasional Indonesia menambahkan kecurigaan pemerintah. Alhasil, via peraturan dan investigasi pemerintah, Pendidikan Nasional Indonesia atau yang biasa disebut PNI – Baru dinyatakan berafiliasi dengan organisasi komunis Belanda. Para pemimpinnya ditangkap dan dibuang ke Boven Digul, Papua.<sup>15</sup>

Setelah beberapa tahun mendekam di Boven Digul, Sjahrir dan Hatta bersama beberapa tahanan lain pada tahun 1935 dipindahkan ke Banda Neira. Disini Sjahrir menghabiskan waktu pengasingan cukup lama dan sempat mengadopsi tiga orang anak asli Banda Neira. Setelah Perang Pasifik pecah pada 1942, Sjahrir dan Hatta dipulangkan oleh pemerintah Hindia ke pulau Jawa. Sjahrir membawa serta ketiga anak angkatnya.<sup>16</sup>

Setelah takluknya Belanda pada Jepang, Sjahrir hidup berpindah – pindah. Pendapatannya pun tidak tetap lantaran sikapnya yang menolak bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Kondisi keluarganya

---

<sup>14</sup> Rosihan Anwar. 2010. *Ibid.*

<sup>15</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, h. 367-377.

<sup>16</sup> Lukman Santoso Az. *Op. Cit.*, h. 83.

ditopang oleh sumbangan dari teman – temannya. Lilly salah satu anak angkatnya sudah bekerja dan Des Alwi yang juga anak angkatnya mendaftar masuk Sekolah Radio. Uang sekolah Des dibayarkan oleh Hatta.<sup>17</sup>

Posisi sulit ini didapatkan Sjahrir lantaran kesepakatannya dengan Hatta dan Soekarno perihal posisinya dalam pergerakan. Sjahrir memegang pos instrumental sebagai organisator gerakan bawah tanah anti Jepang, sementara Soekarno dan Hatta berperan sebagai kolaborator. Sjahrir sering memberikan diskusi – diskusi politik kepada para pemuda, yang nantinya akan membentuk golongan Sjahrir.<sup>18</sup>

Selama masa pendudukan itu juga, Sjahrir rajin mendengarkan siaran radio internasional melalui sebuah radio yang disembunyikannya di dalam lemari. Posisi Sjahrir yang memungkinkan untuk menyimpan radio itu menjadi salah satu poin terpenting bagi gerakan bawah tanah Indonesia, sebab rakyat Indonesia hanya boleh dan bisa mendengarkan frekuensi radio Domei milik Jepang.<sup>19</sup>

Kelebihan yang dimilikinya ini membuat Sjahrir mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di luar Hindia, termasuk dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Sjahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, namun Soekarno

---

<sup>17</sup> Lukman Santoso Az. *Op. Cit.*, h. 89.

<sup>18</sup> Lukman Santoso Az. *Ibid.*

<sup>19</sup> Tim Tempo. *Op. Cit.*, h. 42-44

yang tidak percaya apa yang disampaikan Sjahrir,<sup>20</sup> menolak. Alhasil terjadilah drama Rengasdengklok dimana Soekarno dan Hatta “diculik” oleh kelompok pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah terjadi cekcok antara golongan muda dan tua, kedua tokoh tersebut dipulangkan dan keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia secara resmi diproklamasikan. Namun Sjahrir sudah sangat geram dan marah akibat ulah Soekarno yang menunda – nunda proklamasi. Sjahrir bahkan sampai menyebut Soekarno *Man Wijf* (kurang lebih artinya Pengecut dan Banci).<sup>21</sup>

Kemarahan tersebut membuat Sjahrir tidak menghadiri pertemuan dan pembacaan Proklamasi kemerdekaan. Namun, usai proklamasi tersebut, Sjahrir tidak berhenti berjuang, melainkan pergi keliling Jawa untuk melihat dan memberitakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjalanan ini disambut dengan gegap gempita, terutama di daerah Cirebon, tempat dimana Sjahrir memiliki basis dukungan.<sup>22</sup>

Dalam *Perjuangan Kita*, Sjahrir menulis bahwa para pemuda terbawa euforia kemerdekaan dan semangat balas dendam untuk melakukan tindak kekerasan yang dianggapnya terbelakang dan tidak perlu.<sup>23</sup> Hal ini kemudian

---

<sup>20</sup> Lukman Santoso Az. *Op. Cit.*, h. 90 ; Hal ini karena Soekarno masih melihat keberadaan tentara Jepang yang kuat di Jakarta dan sekitarnya.

<sup>21</sup> Subadio Sastrosatomo. 1987. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, h. xxxiv

<sup>22</sup> Lukman Santoso Az. *Op. Cit.*, h. 102.

<sup>23</sup> Sutan Sjahrir. 2010. *Perdjoeangan Kita*. Jakarta : Anjing Galak Penerbitan, h. 7.

membuat dia banyak bermusuhan dengan kaum militan dalam menentukan arah pergerakan Indonesia usai kemerdekaan.

Dalam tulisan yang berbentuk pamflet ini juga, Sjahrir mengkritisi pemerintahan kabinet pertama Presiden Soekarno karena dinilai terlalu pro – Jepang dan terlihat fasis. Tuduhan ini didasari fakta bahwa kebanyakan anggota kabinet adalah kolaborator Jepang dan sistem pemerintahannya yang bersifat presidensiil tidak mencerminkan demokrasi karena memusatkan segala kekuasaan pada tangan Presiden.<sup>24</sup>

Bagi Sjahrir, Indonesia butuh mengadopsi demokrasi ala barat. Hal ini dikarenakan beberapa alasan dimana salah satunya adalah wajah apa yang akan ditunjukkan Indonesia pada dunia. Tindakan anarki dan main hakim sendiri yang lumrah terjadi pada masa itu akan berdampak buruk pada wajah Indonesia di dunia luar. Pejuang kemerdekaan Indonesia akan dipandang sebagai kelompok pemberontak dan pemerintah Indonesia akan dicap boneka Jepang yang fasis.<sup>25</sup>

Usaha Sjahrir itu kemudian menghasilkan sebuah peristiwa lain lagi. Fungsi demokrasi hanya bisa dijalankan dengan adanya badan legislatif yang bertugas membuat undang – undang dan mengawasi kinerja Presiden serta menjadi wakil rakyat. Indonesia memiliki KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), namun badan ini masih bersifat sebagai pembantu Presiden sesuai

---

<sup>24</sup>Benedict R. O. G. Anderson.1988. *Revoloesi Pemoeda : Pendudukan Jepang dan perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, h. 192.

<sup>25</sup> Sutan Sjahrir. 2010. *Op. Cit.*,h. 19-26.

dengan putusan hasil rapat pada 23 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta di daerah Gambir.<sup>26</sup>

Sjahrir diminta oleh golongan pemuda untuk menjadi ketua badan ini, namun kemudian menolak, dengan alasan ingin menunggu peran KNIP dalam pengabdianya terhadap masyarakat. Kemudian pada 16 Oktober 1945, musyawarah KNIP mengangkat Sutan Sjahrir sebagai ketua BP – KNIP (Badan Pekerja – KNIP) dan Amir Syarifuddin sebagai wakilnya. Tugas kedua orang ini adalah membentuk anggota BP – KNIP yang umumnya terdiri dari tokoh gerakan bawah tanah, golongan cendekiawan dan bahkan politisi.<sup>27</sup> Pada tanggal yang sama ini pula, pemerintah mengeluarkan Maklumat No. X/1945 atas nama Wakil Presiden Hatta yang mengubah secara teknis fungsi KNIP menjadi sebuah lembaga legislatif.

Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menindaklanjuti usulan BP KNIP pada 30 Oktober 1945 dengan tujuan pembentukan Partai – Partai Politik. Keadaan ini perlu dalam rangka mewujudkan demokrasi, yaitu dengan wadah partai politik. Adanya partai politik ini juga penting sekali dalam rencana transformasi KNIP menjadi lembaga legislatif.

Usai keluarnya Maklumat 3 November tersebut, Sjahrir membentuk Partai Sosialis, usai menggabungkan Partai Rakjat Sosialis bentukannya

---

<sup>26</sup> Slamet Muljana. 2008. *Kesadaran Nasional : Dari Kolonialisme hingga Kemerdekaan, Jilid II*. Yogyakarta : LKIS, h. 48.

<sup>27</sup> Sutan Sjahrir. 1990. *Renungan dan Perjuangan*. Jakarta : Djambatan, h. 280.

dengan Partai Sosialis Indonesia bentukan Amir Sjarifuddin. Beberapa hari kemudian, Syahrir diminta untuk menuliskan pemikirannya terkait dengan kemerdekaan Indonesia (Tulisan ini, dengan judul *Perjuangan Kita*, terbit dalam bentuk pamflet pada 10 November 1945, bertepatan dengan pecahnya Pertempuran Surabaya).

Soekarno menyerah atas tuntutan Syahrir tersebut dan memberikan mandat kepada Sjahrir untuk menjadi Perdana Menteri dan membentuk kabinet kedua yang juga merupakan kabinet pertama di Indonesia dengan sifat Ministerial. Sjahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri meskipun pada saat itu masih berposisi sebagai Ketua KNIP.<sup>28</sup>

Kabinet Sutan Sjahrir yang akan dibahas terdiri dari Kabinet Pertama (14 November 1945 – 12 Maret 1946), Kabinet Kedua (13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946), serta Kabinet Ketiga (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947) yang bekerja di bawah bayang – bayang perang dengan Belanda.

Berdasarkan data yang ada, hal lainnya yang penting namun jarang diekspos dalam segala literatur sejarah adalah fungsi pemerintahan Sjahrir. Begitu banyak sekali literatur sejarah yang membahas Sjahrir secara terbatas. Dalam lingkungan akademisi perdebatan yang hangat adalah peranan Sjahrir dalam pergerakan nasional serta usahanya dalam mewujudkan kemerdekaan. Dalam buku pelajaran tingkat sekolah, Sjahrir disinggung sedikit sekali dan tidak jauh dari gelarnya sebagai perdana menteri pertama

---

<sup>28</sup> Benedict R. O. G. Anderson. *Op. Cit.*, h. 207.

serta peranannya dalam perjanjian Linggarjati yang dianggap merugikan Indonesia.

Tidak banyak narasi seputar pemerintahan domestik Sjahrir danapa saja program – programnya dalam membangun Negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sebab kabinet Sjahrir tidak hanya mengurus masalah perang dan diplomasi, melainkan juga urusan domestik, yang tentunya signifikan untuk diteliti lebih lanjut.

Selain permasalahan yang disebut diatas, perlu juga diteliti mengenai pertentangan yang dialami Sjahrir sebagai seorang Perdana Menteri dengan beberapa tokoh nasional seperti Amir Sjarifuddin, dan Tan Malaka yang sedikit banyak mempengaruhi keputusan pemerintahannya dalam berbagai permasalahan.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis membatasi permasalahan dari penelitian ini pada sejarah fungsional dari pemerintahan perdana menteri Sjahrir, serta konflik yang terjadi disekitar Sjahrir dan pengaruh konflik tersebut kepada fungsi pemerintahan kabinet Sjahrir.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana jalan pemerintahan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri selama berlangsungnya Revolusi Kemerdekaan Indonesia?

2. Bagaimana dampak perkembangan politik terhadap pemerintahan Sutan Sjahrir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara naratif peranan Sjahrir sebagai Perdana Menteri selama masa kekuasaannya (1945-1947). Sjahrir dilihat bukan hanya sebagai tokoh perjuangan namun sebagai Perdana Menteri yang berarti adalah secara *de jure* merupakan orang paling berkuasa nomor tiga di Indonesia dan secara *de facto* orang paling berkuasa nomor satu. Narasi bagaimana Sjahrir menjalankan kekuasaan tersebut dan apa saja program pemerintahan saat Sjahrir berkuasa serta eksekusi program tersebut adalah tujuan utama penelitian ini.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoretis, penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan yang menyelami perjalanan sejarah Sutan Sjahrir serta lika liku perjuangan di masa awal kemerdekaan Indonesia. Secara praktis, penelitian ini berfungsi untuk menambahkan sumber bantuan bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang relevan.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian historis yang menurut Louis Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>29</sup> Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif – naratif yang terdiri dalam lima langkah : Pemilihan Topik, Heuristik, Kritik , Interpretasi, dan Historiografi.<sup>30</sup>

Pada langkah pertama yaitu Pemilihan Topik, penulis menentukan narasi pemerintahan Sutan Sjahrir sebagai topik, dan fokusnya berupa dinamika politik pemerintahan Sutan Sjahrir. Tahap kedua yaitu Heuristik, merupakan tahap mencari dan menemukan sumber sejarah dan apa saja yang terkait dengan sumber tersebut.<sup>31</sup> Penulis menerapkan tahap heuristik dengan cara mengunjungi lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Setelah memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dikerjakan, maka diadakan pengujian terhadap data maupun sumber sejarah tersebut. langkah tersebut dikenal sebagai Kritik, yaitu tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber – sumber yang didapat kemudian dicek

---

<sup>29</sup>Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah (terj. Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: UI-Press., h. 39.

<sup>30</sup>Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.,h 91

<sup>31</sup>Kuntowijoyo. *Ibid.*, h. 95.

kebenarannya melalui perbandingan dengan buku atau sumber – sumber lainnya.

Kritik tersebut dapat diaplikasikan dalam dua bentuk yaitu Kritik Ekstern dan Kritik Intern. Dalam Kritik Ekstern, dilakukan pengujian otentisitas atau keaslian sumber. Sementara dalam Kritik Intern, dilakukan verifikasi kredibilitas dan kebiasaan dipercayainya sumber dalam penelitian sejarah.<sup>32</sup>

Langkah berikutnya adalah Interpretasi atau penafsiran. Dalam langkah ini, data diberikan pemaknaan sejarah berdasarkan pada penalaran peneliti yang ditunjang oleh sumber – sumber sejarah yang diperoleh.<sup>33</sup> Setelah langkah tersebut selesai, maka pada langkah terakhir, dilakukan Historiografi yang berupa penulisan sejarah sebagaimana ia dikisahkan (*histoire-recite*) yang mencoba memahami sebagaimana ia terjadi (*histoire-realite*).<sup>34</sup>

## **F. Bahan Sumber**

Bahan sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu Sumber Primer dan Sekunder. Sumber Primer merujuk pada arsip – arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu *Peraturan – Peraturan Pemerintah RI di Jogjakarta* yang menjelaskan berbagai perintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Perdana Menteri

---

<sup>32</sup>Kuntowijoyo.*Op. Cit.*, h. 101

<sup>33</sup>Kuntowijoyo.*Op. Cit.*, h. 103

<sup>34</sup>Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: PT Gramedia, h. xv.

Sutan Sjahrir dan *Netherland Forces Intelligence Service – NEFIS/ARA Document* yang merupakan dokumen intelijen militer Belanda dan Sekutu yang menjelaskan seputar keadaan Negara Indonesia pada 1945-1949.

Selain itu diperoleh pula surat kabar sezaman dari Australia, antara lain *The Mercury, The Daily Mercury, The Examiner, The Advocate, The Northern Star, Cootramundra Daily Herald*, dan *The Cairns Post* yang terbit pada periode 1945 – 1947. Surat kabar ini menyajikan berita seputar tahun – tahun pemerintahan Sjahrir, susunan kabinet Sjahrir, dan peristiwa konflik yang terjadi disekitar Revolusi Kemerdekaan. Surat kabar ini didapatkan melalui Arsip Digital Online milik National Library of Australia.

Untuk sumber sekunder, penulis mendapatkan sumber berupa buku – buku yang menuliskan tentang Sjahrir dan kejadian seputar kemerdekaan dan revolusi kemerdekaan. Beberapa diantaranya adalah, karya George McTurnan – Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, karya Benedict R.O.G. Anderson, *Revolusi Pemoeda*, karya Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia*, serta karya Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*. Sumber sekunder ini didapat sebagian besar berupa pinjaman dari Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, membaca di Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Prodi Sejarah Universitas Negeri Jakarta, dan Perpustakaan Nasional Indonesia, serta koleksi pribadi.

Terdapat pula penelitian yang relevan berupa skripsi karya Moch.Ihsan Pratama dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang berjudul

*Dinamika Internal Kabinet Syahrir Masa Revolusi Indonesia, 1945-1947.* Terdapat persamaan dalam tema yang digarap oleh penulis dengan saudara Moch. Ihsan Pratama. Namun penulis sendiri membuat beberapa perbedaan dalam perspektif penelitian. Jikalau saudara Moch. Ihsan Pratama dalam skripsinya meneliti dinamika internal yang terjadi dalam tubuh kabinet Syahrir, maka penulis mengambil perspektif berupa fungsi pemerintahan Sjahrir dalam kehidupan pemerintahan sehari – hari.

Selain itu dalam skripsinya, Moch. Ihsan Pratama menampilkan persaingan antara Sjahrir dan Amir Sjarifuddin sebagai bagian dari dinamika internal kabinet, sebab Amir Sjarifuddin merupakan bagian dari kabinet Sjahrir. Penulis kembali mengambil arah lain, dengan menggarisbawahi perkembangan politik yang terjadi berupa peristiwa – peristiwa yang mempengaruhi roda pemerintahan Sutan Sjahrir.

## **BAB II**

### **AWAL PEMERINTAHAN SUTAN SJAHRIR SELAMA REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA**

Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menindaklanjuti usulan BP KNIP pada 30 Oktober 1945 dengan tujuan pembentukan Partai – Partai Politik. Keadaan ini perlu dalam rangka mewujudkan demokrasi, yaitu dengan wadah partai politik. Adanya partai politik ini juga penting sekali dalam rencana transformasi KNIP menjadi lembaga legislatif.

Usai keluarnya Maklumat 3 November tersebut, Sjahrir membentuk Partai Sosialis, usai menggabungkan Partai Rakjat Sosialis bentukannya dengan Partai Sosialis Indonesia bentukannya Amir Sjarifuddin. Beberapa hari kemudian, Syahrir diminta untuk menuliskan pemikirannya terkait dengan kemerdekaan Indonesia (Tulisan ini, dengan judul *Perjuangan Kita*, terbit dalam bentuk pamflet pada 10 November 1945, bertepatan dengan pecahnya Pertempuran Surabaya).

Soekarno menyerah atas tuntutan Syahrir tersebut dan memberikan mandat kepada Syahrir untuk menjadi Perdana Menteri dan membentuk kabinet kedua yang juga merupakan kabinet pertama di Indonesia dengan sifat

Ministerial. Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri meskipun pada saat itu masih berposisi sebagai Ketua KNIP

#### **A. Pembentukan Kabinet Sjahrir Yang Pertama**

Usai keputusan pengangkatan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri diumumkan, maka pada tanggal 14 November 1945, susunan kabinet pun diumumkan. Dalam kabinet baru ini, Sjahrir memegang kendali tertinggi yaitu sebagai Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Amir Sjarifuddin, yang dekat dengan Sjahrir diangkat untuk menduduki dua posisi, yaitu sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Keamanan Umum.<sup>1</sup>

Tidak seperti kabinet pertama pimpinan Presiden Soekarno yang kebanyakan berisi administrator pribumi pada zaman Jepang dan para pemuda yang menjadi tulang punggung revolusi, kabinet kedua dibawah Sjahrir ini didominasi oleh para ahli didikan Belanda, serta administrator yang pernah bertugas dibawah pemerintah Belanda. Sjahrir nampak tidak memiliki kepercayaan sama sekali kepada para pejabat didikan Jepang.

Anggapan terhadap kabinet ini sangatlah dingin jikalau bukan berisi penolakan. Satu per satu menteri dalam kabinet ini dituduh terlalu terkait dengan politik etis Belanda sehingga dikhawatirkan akan membuat jalan republik yang sedang dalam masa revolusi ini berbalik arah kembali ke kolonialisme. Beberapa

---

<sup>1</sup> Rudolf Mrazek. 1996. *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, h. 504

diantara menteri – menteri ini yang mendapatkan kritikan cukup tajam karena dinilai terlalu dekat dengan pemerintahan kolonial Belanda, antara lain, Dr. T.S.G. Moelia, yang menjabat Menteri Pendidikan, dan Mr. Soewandi, menteri kehakiman.<sup>23</sup>

Selain kritikan yang dilontarkan para pemuda dan tentang kedekatan banyak anggota kabinet dengan Belanda, adapula kritik yang ditujukan pada kabinet bahwa keanggotaannya kurang mewakili diversifikasi rakyat Indonesia. Keluhan terutama diarahkan pada representasi pihak Kristen yang berjumlah empat orang dari sebelas menteri yang ada. Jumlah demikian dinilai tidak mewakili Islam sebagai agama mayoritas dan dengan begitu juga ikut mengurangi kapasitas agama lainnya untuk terwakili.<sup>4</sup>

Kabinet ini sendiri didominasi oleh pengikut atau setidaknya orang yang memiliki kedekatan dengan Sjahrir. Sunario, Darmasetiawan, dan Soewandi serta Abdul Karim merupakan teman – teman dekat Sjahrir. Dr. Moelia adalah sepupu Amir Sjarifuddin, dan menurut Ben Anderson, ada kemungkinan Soekarno – Hatta mengintervensi seleksi kabinet dengan menganulir setiap calon dari kalangan pemuda, walaupun jika merujuk pada *Perdjoangan Kita*, Sjahrir sendiri memiliki

---

<sup>2</sup> Mrazek, *Op. Cit.*

<sup>3</sup> Ketidakpercayaan Sjahrir pada para administrator Jepang ini dikemukakan dengan jelas dalam pamflet karyanya, “*Perdjoangan Kita*” yang ditulis semasa Pertempuran Surabaya sekitar 9-10 November 1945

<sup>4</sup> B.R.O.G. Anderson. 1988. *Revoloesi Pemoeda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 227.

tendensi untuk melakukan hal yang sama, tanpa perlu intervensi kedua tokoh tersebut.<sup>5</sup>

Apapun alasan yang kemudian mendasari pembentukan kabinet ini, banyak pihak di dalam negeri yang kecewa. Kekecewaan ini pula terjadi karena tidak ada representasi pemuda dalam kabinet. Jika pada kabinet sebelumnya Soekarni dan Chaerul Saleh menjadi perwakilan kaum pemuda, dalam kabinet Sjahrir ini mereka tidak mendapat satu kursi pun.

Padahal, jika kita menelusuri kembali usaha pengangkatan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri, pergulatan dalam KNIP yang kemudian menghasilkan dukungan pada Sjahrir bergantung pada kelompok Pemuda. Suara dan aksi mereka yang menjamin masuknya Sjahrir dalam roda eksekutif pemerintahan. Namun, dengan keluarnya naskah *Perdjoangan Kita*, maka secara otomatis para pemuda yang mayoritas merupakan kolaborator Jepang dengan segera masuk dalam daftar hitam dan kehilangan posisi dalam pemerintahan.<sup>6</sup>

Sementara itu di tengah kalangan pemuda sendiri, anggapan negatif terhadap kabinet Sjahrir bermunculan. Selain karena kehilangan pengaruh politik yang signifikan, kaum pemuda yang telah mengalihkan permusuhan dari pihak Jepang

---

<sup>5</sup> Anderson. *Ibid.* h. 228.

<sup>6</sup> J. D. Legge. 2010. *Intellectuals and Nationalism in Indonesia : A study of the Following recruited by Sutan Sjahrir in occupied Jakarta*. Singapore : Equinox Publishing, hal. 159-161

kepada Inggris dan Belanda, merasa penempatan orang – orang pro Belanda dalam kabinet sebagai suatu tindakan yang tidak menghargai perjuangan mereka.<sup>7</sup>

Kecurigaan pun memuncak bahwa kabinet ini memiliki tujuan kompromistis dengan pihak sekutu daripada berusaha melawannya. Baik Sjahrir, maupun Amir melawan balik berbagai kritik dan tuduhan yang dilancarkan pada kabinetnya. Mereka berdua menyatakan kalau kabinetnya bersih dari kolaborator Jepang, dan akan jauh lebih kuat secara politik, dan demokratis dalam menjalankan pemerintahan serta menegakkan ketertiban, dibandingkan pendahulunya yang kehilangan kontrol di Surabaya.<sup>8</sup>

Serangan lainnya muncul dari kalangan mantan menteri dari Kabinet sebelumnya dan kelompok Tan Malaka. Mereka mengklaim bahwa baik Kabinet baru maupun Badan Pekerja KNIP yang sedang aktif tidak representatif, menurut mereka seharusnya kedua lembaga tersebut berbentuk suatu koalisi.<sup>9</sup> Karena tekanan yang

---

<sup>7</sup> Anderson, *Ibid* ;

<sup>8</sup> Masalah di Surabaya ini, merujuk pada pertempuran Surabaya yang mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945 ketika Inggris melakukan serangan kedua pada kota tersebut. Presiden Soekarno sebagaimana dalam autobiografinya, menyatakan dia berhasil menghentikan pertempuran pertama atas permintaan Inggris, namun kehilangan kontrol pada pertempuran kedua yang terjadi akibat terbunuhnya komandan Inggris di Surabaya, Brigadir Mallaby. Menurut Laporan Militer Belanda yang terangkum dalam *NEFIS Geheim Archief No. 19* tertanggal 20 April 1946, komando militer Indonesia di Surabaya kacau balau, dan tidak ada kontrol sama sekali terhadap aksi para pejuang di kota tersebut. Hal ini membuat Inggris tidak memiliki kekuatan politik dalam menghentikan pertempuran sehingga memaksa mereka menggunakan seluruh kekuatan bersenjata baik dari darat, laut, dan udara untuk menggempur kota tersebut. Gempuran berhasil mengusir sebagian besar kekuatan militer Republik, walaupun dengan korban jiwa rakyat sipil yang sangat besar. Lihat juga Cindy Adams. 1965. *Sukarno : An Autobiography, As Told to Cindy Adams*. New York : The Bobbs – Merrill Company Inc, h. 228-230

<sup>9</sup>George McT. Kahin. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok : Komunitas Bambu, h. 242

begitu besar baik dari kalangan politisi maupun pers, Amir Sjarifuddin menyatakan bahwa kabinet akan mengadakan sidang KNIP.

Sidang berlangsung pada tanggal 25-27 November 1945 dan berlangsung di Jakarta. Dalam sidang tersebut, KNIP memutuskan menerima pengajuan mandat kabinet, dan menyetujui kabinet mulai bertanggung jawab pada KNIP melalui Badan Pekerja. Suara yang menyetujui ada 84, yang menolak 8, yang memutuskan abstain 15. Dengan demikian maka kabinet berhasil melewati tantangannya yang pertama.<sup>10</sup>

Usai sidang KNIP, kabinet mengumumkan program – programnya. Program tersebut antara lain :

1. Menyempurnakan susunan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan rakyat
2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat didalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan prikeadilan dan prikehumanusiaan
3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat, diantaranya dengan jalan pembagian makanan

---

<sup>10</sup>George McT. Kahin. *Ibid.*, h.243. Tidak ada info spesifik baik menurut Kahin maupun Ben Anderson tentang siapa yang terlibat dalam voting ini. Akan tetapi kemenangan kabinet dapat secara serius dikaitkan dengan kontrol yang dipegang Sjahrir terhadap BPKNIP yang dapat dengan mudah mempengaruhi suara mayoritas anggota KNIP. *Ibid.* h. 220 memaparkan setidaknya Sjahrir memiliki pendukung sebanyak 7 orang dari 17 anggota BPKNIP, diantaranya Dr. A. Halim, Subadio Sastrosatomo, Tan Ling Djie, dan dr. Sudarsono. Terlebih lagi absensi para penentang Sjahrir dari PNI di daerah yang tidak bisa hadir di sidang karena kondisi bahaya ikut mempengaruhi hasil, lih. *Ibid.* h. 300, poin no. 35; Kelompok pendukung Sjahrir yang sudah ada sejak sebelum proklamasi ini memang bukanlah sekelompok ketat melainkan kumpulan “kenalan” dan “pendukung” yang dukungan politiknya mudah berubah, seperti Tan Ling Djie yang justru pada akhir pemerintahan Kabinet Sjahrir yang ketiga ikut memaksa Sjahrir mengundurkan diri. Lihat, J.D. Legge *Op. Cit*, hal. 98-99

4. Berusaha mempercepat penyelesaian perihal ketersediaan Orang Republik Indonesia (ORI)<sup>11</sup>

Program – program tersebut menggambarkan jalan praktis yang ditempuh oleh kabinet. Alih – alih mengambil program idealistik seperti memperjuangkan kemerdekaan 100%, kabinet memilih menyelesaikan lebih dahulu urusan yang lebih mendesak, seperti penyempurnaan pemerintahan daerah dan pengaturan logistik rakyat yang memang secara langsung mengancam keberadaan republik jika terjadi kesalahan pengurusan.<sup>12</sup>

Sementara itu, tanggapan mengenai kabinet yang baru dibentuk ini dari pihak Belanda cukup beragam. Ada yang negatif dengan kabinet ini karena masih dianggap penerus pemerintahan boneka yang dipimpin Presiden Soekarno, adapula yang positif dan bahkan ikut berusaha mencari dukungan bagi kemerdekaan Indonesia di Belanda. Kelompok yang pertama merupakan golongan konservatif yang berusaha mengembalikan posisi Belanda di nusantara.

Sementara kelompok kedua berisi barisan liberal dan progresif yang kebanyakan diisi oleh mahasiswa Indonesia yang tinggal di Belanda. Beberapa diantara mereka adalah T. M Djaliloeddin, P. Loebis, Setiadjit, dan T. M. Joesoef. Para mahasiswa ini bekerjasama dengan tokoh – tokoh sosialis Belanda yang dulu

---

<sup>11</sup>Kahin. *Ibid.*

<sup>12</sup>NEFIS *Geheim Archief no. 19, Op. Cit.* Food Situation. Militer Belanda melaporkan, baik di wilayah kekuasaan republik maupun sekutu, kondisi logistik sangat mempengaruhi ketertiban wilayah. Sedikit saja terjadi kesalahan dalam operasional logistik, maka dapat menyebabkan kerusuhan yang tidak diinginkan. Secara potensial, kerusuhan ini bisa mengancam eksistensi republik.

pernah dekat dengan Sjahrir seperti Frans dan J.A.G. Goedhart, Sal Tas, dan juga L.N. Palar (yang nantinya kembali ke Indonesia).

Hasil kerjasama mereka berupa dukungan lebih jauh bagi pemerintahan Indonesia yang diberikan oleh beberapa politikus dan akademisi Belanda seperti, Gobee dan J. M. Romein. Selain di Belanda, beberapa kawan lama dan kenalan Sjahrir juga bergerak di London, Inggris. Mereka berusaha memperkenalkan Indonesia pada rakyat Inggris dan meraih respon positif pemerintahannya. Mereka yang bertugas di kota ini antara lain, P.J. Schmidt<sup>13</sup>, Sumitro Djojohadikusumo<sup>14</sup>, Dorothy Woodman, John Coast, Soetan Mohammad Zainal Zain, dan koresponden Belanda mereka di Jawa, Jacques de Kadt (yang menggunakan nama samaran sebagai seorang Inggris bernama J. Catt untuk menghindari amuk massa yang anti dengan Belanda).<sup>15</sup>

Adanya kelompok London ini menimbulkan ketidaksenangan dalam diri Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Humbertus J. Van Mook. Kekesalan Van Mook ini disebabkan beberapa hal, diantaranya surat kabar Inggris yang banyak menggunakan sumber dari kelompok London ini, tidak memberikan gelar dan menyebutkan jabatan ketika menyebut nama Van Mook, sementara nama Sjahrir selalu diawali “Perdana Menteri”, dengan demikian publik Inggris seolah – olah

---

<sup>13</sup> yang memiliki koneksi hingga ke Perdana Menteri Inggris Clement Atlee, politikus Anthony Bevan, dan Sir Stafford Cripps.

<sup>14</sup> kakak Subianto, salah satu pemuda pengikut Sjahrir yang tinggal di Belanda semasa perang, kelak menjabat Menteri Ekonomi dan Menteri Keuangan pada masa demokrasi parlementer.

<sup>15</sup> Mrazek, *Op. Cit.*, h. 510-520

mengakui keberadaan Indonesia, meskipun pemerintahan Inggris tidak pernah memberikan statement apapun menyoal baik kedudukan Belanda maupun Indonesia.<sup>16</sup>

Usaha diplomasi tidak resmi ini sedikit banyak membantu pemerintah untuk mengiklankan keberadaan Indonesia pada dunia luar. Pendaratan Sekutu di Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan republik, meski memberikan akses dunia luar yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Sjahrir dengan datangnya para wartawan asing, namun secara fisik membatasi gerak gerak pemerintahan republik yang disebabkan oleh serangkaian patroli militer sekutu yang menangkap siapa saja yang dianggap melanggar peraturan.

Pada masa awal ini, bisa disimpulkan Sjahrir berkonsentrasi untuk mendirikan hubungan diplomatik dengan otoritas luar negeri yang ada di Jakarta. Letjen Sir Phillip Christison, komandan pendaratan sekutu di Jakarta, sebelumnya sudah mengakui keberadaan republik secara *de facto*, sehingga mempermudah baik gerakan tentara Inggris yang mencari kamp interniran Jepang untuk menyelamatkan para tawanan perang, maupun diplomasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan.

Dalam beberapa kesempatan, para pemuda pendukung Sjahrir, yang berkeliling kota dan mengecat tembok – tembok dengan berbagai macam slogan

---

<sup>16</sup> Mrazek, *Ibid.* h. 515. Posisi Inggris ini dapat dipahami. Inggris ingin segera hengkang dari nusantara karena keberadaan mereka menguras sumber daya yang sejatinya digunakan untuk memulihkan ketertiban di tanah koloni Inggris seperti India dan Malaya, bukannya mengurus tanah jajahan negara lain, dalam hal ini Hindia Belanda yang merupakan milik Kerajaan Belanda, bukan Inggris.

kemerdekaan dalam bahasa Inggris, bertemu dengan kelompok tentara India yang berpatroli. Antara keduanya pihak ini terdapat semacam pengertian akan satu sama lain. Dibantu dengan kesamaan agama yang dimiliki oleh mayoritas baik di pihak patroli India maupun pemuda, yaitu Islam, maupun kesamaan rasa dimana orang – orang India ini juga sedang berusaha memperjuangkan kemerdekaannya, terdapat rasa saling mengagumi diantara mereka. Dibandingkan dengan patroli reguler Inggris ataupun kesatuan polisi militer dari NICA, para pemuda ini tidak mengalami apa – apa jika bertemu patroli India.<sup>17</sup>

Jika para pemuda berpapasan dengan tentara reguler Inggris (yang kebanyakan berkulit putih), maupun dengan polisi militer Belanda mereka bisa dihentikan ditempat, digeledah, ditangkap, atau dalam beberapa kasus ditembak mati. Sehingga yang terjadi kemudian adalah, para pemuda membalas tindak terror tersebut dengan terror balik terhadap regu – regu Belanda maupun Inggris yang terpisah dari induk patrolinya. Hasilnya terjadi berbagai baku tembak di jalan – jalan jakarta, seperti di Matraman, Senen, hingga ke pinggiran Bekasi.<sup>18</sup>

Pemerintahan yang baru berdiri itu tidak bisa berbuat banyak, karena memang kekurangan personel. Kesatuan tentara yang ada di seputaran jakarta kebanyakan berisi rampok dan jago yang kesetiannya tidak bisa diandalkan. Kesatuan republik yang paling dekat berada di Akademi Militer Tangerang. Kesatuan ini banyak berisi

---

<sup>17</sup> Rosihan Anwar. *Ibid.*, h. 83.

<sup>18</sup> Rosihan Anwar. *Ibid.*, h.115-122.

para kadet perwira yang berasal dari pemuda – pemuda yang pernah tergabung dalam barisan militer bentukan Jepang dan kaum urban muda yang tidak selesai kuliah dan memilih masuk jalan militer, salah satu diantara mereka adalah Subianto dan Elias Daniel Mogot, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Daan Mogot.<sup>19</sup>

Kesatuan inipun tidak bisa sepenuhnya diandalkan oleh pemerintahan Sjahrir. Bukan karena loyalitas yang diragukan, melainkan karena kesatuan ini memiliki kesibukan sendiri di wilayah Tangerang. Wilayah yang sedari awal kemerdekaan ini tidak terkontrol pemerintah, menjadi sarang bagi pelaku tindak kriminal yang melakukan teror pada kelompok penduduk setempat dan tak jarang juga melebarkan terornya ke Jakarta. Detasemen ini bahkan kurang tenaga untuk menumpas beberapa laskar yang kemudian memproklamirkan berdiri sendirinya wilayah mereka yang bebas dari pemerintah Indonesia. Fokus utama detasemen ini adalah melindungi publik setempat, terutama kelompok Tionghoa yang selalu dijadikan target utama para perampok karena kekayaan mereka.<sup>20</sup>

Keadaan di Tangerang menjadi sebuah situasi yang unik bagi republik yang baru berdiri. Pemerintahan Jakarta telah mendirikan pemerintah setempat, namun karena kedekatan para anggotanya baik dengan Belanda maupun Jepang, mendapatkan dukungan yang sangat sedikit. Sepanjang oktober hingga november, kondisi di Tangerang tidak mendukung, baik untuk pemerintahan Soekarno maupun

---

<sup>19</sup> Rosihan Anwar. *Ibid.*, h.103.

<sup>20</sup> Robert Cribb. 2009. *Gangster and Revolutionaries: The Jakarta People and the Indonesian Revolution 1945-1949*. Singapore : Equinox Publishing, h. 52-53.

Sjahrir, dan Akhmad Khairun, seorang tokoh setempat, memobilisasi laskar yang menyebut dirinya, ubel – ubel, dan memproklamasikan pemerintahan sendiri yang terpisah dan sepenuhnya bebas dari pemerintahan pusat di Jakarta.<sup>21</sup>

## **B. HUBUNGAN AWAL MILITER DAN KABINET**

Pada awal kemerdekaan, kekuatan militer Indonesia tidak terpetakan sama sekali. Basis kekuatan militer republik bergantung pada kesediaan rakyat untuk sukarela mengangkat senjata melawan Jepang dan Sekutu. Pertama kali terbentuk sebagai Badan Keamanan Rakyat, tugas kesatuan semi militer tersebut adalah memfasilitasi kepentingan sekutu dalam mencari tahanan militer sekutu di kamp – kamp Jepang serta melucuti persenjataan militer Jepang. Kesatuan yang dipimpin oleh Kasman Singodimedjo (Komandan Peta Wilayah Jakarta) ini tidak memiliki seragam dan kebanyakan tidak bersenjata. Pada 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat dibentuk untuk memfasilitasi kebutuhan republik akan kesatuan militer untuk mempertahankan negara. Meskipun menjadi sebuah organisasi resmi diatas kertas, TKR secara praktikal sangat terbatas dalam berbagai logistiknya.

Seragam kesatuannya berbeda – beda, dan terkadang bahkan prajuritnya tidak memakai seragam sama sekali. Statistik diatas kertas tentang logistik persenjataannya adalah 5:1, yang berarti tiap lima orang tersedia satu senjata. Aturan kepangkatannya

---

<sup>21</sup> Robert Cribb. *Ibid.*; Rosihan Anwar. *Petite Histoire Jilid 7.Op. Cit.*, h. 126-128

pun bergantung pada pengaruh perorangan. Semakin banyak seorang prajurit membawa rekrutmen, maka semakin tinggi pangkatnya.<sup>22</sup> Meskipun begitu, beberapa jabatan staf yang cukup vital dipegang oleh para perwira yang pernah dilatih secara khusus baik oleh Belanda, maupun Jepang.

Hal ini membuat kesatuan militer Indonesia tidak terorganisasi, tidak profesional, dan cenderung tidak disiplin. Keadaan ini lebih lanjut membuat TKR, meskipun memiliki jumlah yang superior dibanding Jepang dan Sekutu, menderita kekalahan di berbagai pertempuran, baik di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Satu – satunya kemenangan TKR berada di Pertempuran Ambarawa.

Bertautan dengan berjalannya berbagai pertempuran antara kesatuan republik dan jepang serta sekutu, dalam tubuh TKR terjadi perselisihan hebat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kesatuan militer Indonesia kacau balau, tanpa disiplin, dan tidak profesional. Hal ini disebabkan oleh pertentangan di dalam Korps Perwira TKR. TKR yang baru dibentuk tidak memiliki kepemimpinan pusat, dan bergantung pada komando daerah masing – masing, dan untuk memecahkan masalah ini serta mengorganisasi tentara menjadi kesatuan yang utuh dan satu doktrin, maka dibutuhkan satu orang sebagai pimpinan tertinggi TKR, diatas para komandan daerah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Cindy Adams. *Op. Cit.*, h. 227-228

<sup>23</sup> Anderson. *Op. Cit.*, h. 265

Pada dasarnya secara teoritis, pemerintah memegang komando tertinggi terhadap militer, namun terbatasnya komunikasi dan transportasi membuat setiap kesatuan militer harus bertindak berdasar inisiatif sendiri – sendiri terlepas dari komando pemerintah pusat yang terisolasi di Jakarta. Aksi inisiatif ini termasuk didalamnya adalah usaha pengorganisasian militer itu sendiri. Sehingga, dapat dengan tepat disebutkan, pembentukan organisasi TKR yang pertama tidak melibatkan baik Kabinet Soekarno, maupun Kabinet Sjahrir dalam batasan apapun, TKR sepenuhnya bertindak sendiri.

Usaha pembentukan staf umum militer menjadi ajang benturan antara dua kubu yang sejak perang kemerdekaan pecah mengontrol segala aspek militer di Indonesia. Kubu pertama adalah kubu mantan anggota KNIL, pasukan Hindia Belanda yang dididik untuk menjadi tentara profesional yang terlepas dari pengaruh politik. Kubu ini memiliki kekuatan dari pengetahuan mereka akan strategi dasar dan sejarah kemiliteran yang sangat berfungsi dalam medan tempur. Merasa diri mereka sebagai satu – satunya kubu yang memiliki pengetahuan organisasi dan staf militer, mereka mengklaim dirinya berhak memimpin TKR secara keseluruhan. Tokoh kesatuan ini antara lain Kolonel A. H. Nasution, Kolonel T. B. Simatupang, dan Mayor Jenderal Oerip Soemohardjo.<sup>24</sup>

Kubu kedua berada pada mantan anggota PETA dan Heiho, dengan demikian merupakan didikan Jepang. Para didikan Jepang ini sangat lemah dalam hal

---

<sup>24</sup> Anderson. *Ibid.* h., 268-269.

pengetahuan strategis militer, namun memiliki kemampuan kepemimpinan dan daya juang yang kuat yang menjadi basis pendidikan mereka dibawah komando Jepang yang hampir tidak mengajarkan mereka sedikitpun pengetahuan strategis dan organisasi militer. Salah satu faktor yang menentukan suara kubu ini adalah jumlah mereka yang mengalahkan jumlah kubu KNIL. Tokoh kelompok ini antara lain Kolonel Sudirman, Kolonel Djatikusumo, dan Kolonel Sutarto.

Uraian Nasution menyimpulkan bahwa kesatuan tentara memiliki 150.000 orang prajurit yang setidaknya pernah dilatih baik oleh Belanda maupun oleh Jepang. Kekuatan tersebut diorganisasi menjadi 400 Batalion tempur dimana diperkirakan pemerintah mampu mempersenjatai 96 Batalion (sekitar 28.000 orang) sebagai kesatuan tempur yang utama.<sup>25</sup>

Untuk membagi kekuatan militer ini agar terdapat pemerataan Batalion tempur di setiap daerah, maka direncanakan pembentukan suatu staf komando militer pusat dan daerah yang akan memimpin seluruh gerakan militer. Staf inilah yang akan menjadi rebutan kedua kubu yang disebutkan sebelumnya. Rencana pertama untuk membentuk staf ini berasal dari Oerip Soemohardjo.

Dalam rencana tersebut, tiga komando daerah didirikan dibawah komando staf umum pusat yang berkantor di Yogyakarta. Komandemen I Jawa Barat ditempatkan dibawah pimpinan Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, Komandemen II

---

<sup>25</sup>Anderson. *Ibid.* h. 269.

Jawa Tengah berada dibawah pimpinan Mayor Jenderal Suratman, dan Komandemen III Jawa Timur berada dibawah komando Mayor Jenderal Muhammad.<sup>26</sup>

Namun rencana Oerip Soemohardjo praktiknya di lapangan gagal. Tujuan rencana tersebut untuk membangun fondasi kedaerahan sebelum membentuk staf umum pusat gagal total ketika para komandan Komandemen tidak diterima di daerah masing – masing. Didi Kartasasmita berkuasa selama sebulan lebih sedikit sebelum akhirnya kehilangan kontrol atas seluruh wilayah Jawa Barat. Suratman yang veteran KNIL tidak diterima oleh para komandan Divisinya yang merupakan veteran PETA. Muhammad bahkan ditangkap oleh komandan polisi militernya sendiri. Kedua orang yang disebut terakhir harus ditarik kembali ke markas pusat Yogyakarta untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.<sup>27</sup>

Sama dengan para komandan Komandemen, para komandan Divisi pun banyak yang mengalami nasib yang sama labilnya. Komandan Divisi I yang mencakup Banten – Bogor, Kolonel K. H. Sjam'oen merupakan bekas Daidancho Banten, yang wibawa dan kuasanya tidak pernah menyebrangi wilayah Banten, tak lama Bogor dilepas dari komando nya dan ditambahkan pada Divisi II yang berbasis di pantai utara Jawa Barat. Semula divisi ini dimaksudkan untuk dipimpin oleh Didi Kartasasmita yang sekaligus akan menjadi komandan Komandemen Jawa Barat. Akan tetapi keributan dan penolakan di kalangan perwira Divisi II dan para

---

<sup>26</sup> Anderson. *Ibid.* h. 270.

<sup>27</sup> Anderson. *Ibid.*

komandan PETA yang memimpin resimen – resimen di Bekasi, Karawang, Cirebon, dan Indramayu membuat staf umum tentara menyerah, dan menunjuk Kolonel Asikin sebagai komandan divisi.<sup>28</sup>

Sementara itu, Divisi III Priangan beralih komando dari tangan mantan Daidancho Cimahi, Kolonel Arudji Kartawinata kepada satu – satunya perwira KNIL yang masih memiliki pengaruh di Jawa Barat, Kolonel Nasution. Divisi IV (Pekalongan – Semarang – Pati) tetap berada dibawah komando veteran PETA, Kolonel Gusti Pangeran Haryo Djatikusumo yang juga mendapat prestise tambahan karena statusnya sebagai paman Susuhunan Surakarta.

Divisi V Banyumas tetap dikomandoi oleh Kolonel Sudirman, Daidancho Banyumas. Divisi VI (Madiun-Kediri), Divisi VIII (Malang – Besuki), dan Divisi IX (Yogyakarta) tetap berda dibawah komando komandan lamanya, masing – masing Kolonel Soediro (Daidancho Kediri), Mayor Jenderal Imam Sudja'i (Malang), dan Kolonel Sudarsono (Yogyakarta). Untuk Divisi VII (Bojonegoro – Surabaya – Madura), komandan divisi Mayor Jenderal Jonosewojo dicopot akibat keterlibatannya dalam penahanan Komandan Komandemen III Jawa Timur Mayor Jenderal Muhammad, posisinya diserahkan kepada Kolonel Sungkono, seorang perwira senior yang memegang peranan besar dalam pertempuran Surabaya. Divisi X Surakarta ditempatkan dibawah komando kakak Kol.Djatikusumo, yaitu Mayor Jenderal Bendoro Pangeran Haryo Purbonegoro yang memiliki resume pendidikan militer di

---

<sup>28</sup> Anderson. *Ibid.*, h. 271

St. Cyr, Breda, Belanda. Namun tak lama kemudian, Pangeran Purbonegoro digantikan oleh Kolonel Sutarto yang memiliki pengaruh sangat kuat.<sup>29</sup>

Meskipun terjadi berbagai penggantian komando di mayoritas divisi yang ada, kendali para komandan baru tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan para pendahulunya. Meskipun secara teori memiliki kuasa penuh akan kesatuan yang mereka pimpin, pada praktiknya eksekusi di lapangan tetap menjadi inisiatif komandan – komandan lapangan yang terbebas dari kontrol sang komandan divisi. Lagi – lagi faktor ketidakadaan disiplin memainkan peran dalam kehancuran strategi ini. Staf Umum yang berada dibawah komando Oerip Soemohardjo terpaksa menyerah pada kenyataan politik di lapangan. Struktur rancangan Oerip hancur, dan para perwira KNIL yang mendominasi staf umum dan komando lapangan tersingkir.<sup>30</sup>

Pada tanggal 12 November 1945, staf umum TKR yang berada dibawah komando Oerip mengadakan sebuah konferensi guna menentukan langkah – langkah yang harus diambil demi penyempurnaan organisasi militer. Akan tetapi konferensi ini berubah menjadi ajang persaingan terbuka antar kedua kubu. Masalah utama yang dipertengorkan keduabelah pihak adalah posisi Panglima Besar. Kubu mantan KNIL

---

<sup>29</sup> Anderson. *Ibid.*

<sup>30</sup> Anderson. *Ibid.*, h. 272

menunjuk Mayor Jenderal Oerip Soemohardjo sebagai calon, dan Kubu mantan PETA menunjuk Kolonel Sudirman (Komandan Divisi V Banyumas) sebagai calon.<sup>31</sup>

Dalam pemilihan tersebut, Kolonel Sudirman menang tipis atas Mayor Jenderal Oerip. Usai pemilihan, Sudirman bergerak sebijak mungkin dalam menata kesatuan militer yang kini berada dibawah komandonya. Ia berhasil meyakinkan Oerip untuk mengurungkan niatnya mengundurkan diri dari posisi kepala staf, bahkan beberapa waktu kemudian, berhasil membina hubungan baik dengan Jenderal Oerip. Mereka sepakat membagi dua tugas militer. Oerip mengurus urusan teknis dan strategi, dan Sudirman akan mengurus politik dan persatuan tentara.<sup>32</sup>

Pandangan Sudirman terhadap politik militer dipengaruhi secara kental oleh tradisi militer Jepang dimana seorang kepala staf umum bertanggung jawab pada Kaisar, dan bukan pada menteri. Dengan demikian, Sudirman berpikir bahwa posisinya sendiri setara dengan orang – orang di kabinet, karena tanggung jawabnya berada langsung pada Presiden. Selain itu, bagi Sudirman, sebagaimana tradisi yang ia tekuni, seorang Menteri Pertahanan haruslah berasal dari kalangan militer sendiri. Sehingga kesatuan tentara secara berani memulai pembicaraan mengenai penempatan seorang militer dalam kabinet sebagai menteri pertahanan. Hampir dengan suara bulat mereka memutuskan untuk memilih Sultan Hamengku Buwono sebagai menteri

---

<sup>31</sup> Anderson. *Ibid.* h. 273

<sup>32</sup> Anderson. *Ibid.* h. 275

pertahanan, karena keteguhan dan jasanya selama pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan.<sup>33</sup>

Aksi politik tentara ini menjadi tantangan langsung terhadap Perdana Menteri Sjahrir yang sudah menetapkan Amir Sjarifuddin untuk menjadi menteri pertahanan. Akan tetapi setelah berbagai kata – kata pedas dilontarkan kedua belah pihak, tentara mundur dari pencalonan Sri Sultan dan menyetujui Amir sebagai menteri pertahanan yang baru. Akan tetapi, tentara menolak mundur atau berkompromi dengan posisi Sudirman.

Mereka bersikeras untuk tetap mengangkat Sudirman sebagai Panglima Besar. Pemilihan Sudirman sendiri sebenarnya illegal karena tanpa persetujuan baik Menteri Pertahanan terdahulu, maupun Presiden, bahkan tanpa sepengetahuan keduanya. Sjahrir memandang pemilihan ini sebagai sesuatu yang berbau fasis dan militeristik, akan tetapi pemerintah terpaksa menyerah untuk menghindari benturan dengan tentara. Pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman resmi naik pangkat menjadi Jenderal dan menduduki posisi Panglima Besar TKR.<sup>34</sup>

Akan tetapi, bukannya menyelesaikan masalah, baik pelantikan Sudirman sebagai Panglima, maupun Sjahrir sebagai Perdana Menteri menimbulkan masalah baru. Keengganan Sjahrir melantik Sudirman yang dinilainya ke Jepang – jepangan dan secara sengaja mengulur konfirmasi kedudukannya selama beberapa minggu

---

<sup>33</sup> Anderson. *Ibid.*, h. 276

<sup>34</sup> Anderson. *Ibid.*, h. 277

membuat retak hubungan kedua tokoh ini satu sama lain. Sudirman dan kawan – kawannya jelas sakit hati karena dituduh fasis dan Sjahrir serta Amir sangat sadar akan permusuhan dari pihak tentara sehingga segera mengambil langkah untuk meminimalisir pengaruh Sudirman. Dalam gelanggang yang lain, permusuhan Sudirman dan Sjahrir ini sudah tercium kemana – mana dan nantinya akan dimanfaatkan oleh lawan politik Sjahrir untuk menjatuhkan kabinetnya.

Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini Amir, sebagai Menteri Pertahanan) untuk mengontrol berbagai keragaman dan tindakan indisipliner dalam tentara adalah dengan merumuskan pembentukan Staf Pendidikan Politik Tentara, atau disingkat “Pepolit”.Keberadaan Pepolit dalam struktur militer ini ditujukan untuk mengatur garis juang tentara agar bisa diarahkan sesuai dengan pandangan politik pemerintah. Akan tetapi, pandangan kejepangan yang dianut oleh sebagian besar perwira Angkatan Darat menginginkan agar kabinet tidak campur tangan dalam urusan militer, dalam hal ini, Pepolit dianggap usaha politisi sipil mencampuri urusan darurat militer yang semestinya menjadi tanggung jawab tentara.

Kepemimpinan Pepolit berisi tujuh orang, antara lain dr. Mustopo, Soekono Djopratikno, Anwar Tjokroaminoto, Wijono, Faried Ma’ruf, H. Abdul Mukti, dan Sumarsono. Menurut A.H. Nasution, kesemuanya diberikan pangkat yang tinggi. Soekono sebagai Letnan Jenderal, dan yang lainnya mengisi pangkat Mayor Jenderal. Kesemua anggota kepemimpinan ini merupakan anggota Partai Sosialis atau

Masyumi, partai lainnya tidak memiliki perwakilan, dan kecuali dr. Mustopo, pengalaman perangnya nihil.<sup>35</sup>

Markas Besar tentara sangat tidak senang akan hal ini, tetapi Amir berargumen bahwa tentara Indonesia harus mencontoh kesuksesan Tentara Merah Soviet yang memiliki struktur sama dan sukses menjadi pemenang Perang Dunia II.<sup>36</sup> Dikemudian hari nanti, permasalahan Pepolit ini akan memicu permusuhan yang makin meruncing antara kabinet dan Markas Besar Tentara.

### **C. Mengontrol Gerakan Pemuda**

Kaum pemuda adalah motor utama Sjahrir dalam mendapatkan kekuasaan. Semasa menjelang kejatuhan kabinet Soekarno, para pemuda menilai kabinet tersebut terlalu condong ke Jepang dan akhirnya kurang radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan karena terlalu banyak berkonsultasi dengan pemerintah Jepang di Indonesia. Dalam angkatan bersenjata republik, unsur pemuda adalah unsur yang sangat besar jumlahnya, namun tidak terorganisasi dengan baik pada masa awal perang.

Amir yang pada awal perang menjabat sebagai wakil ketua Badan Pekerja KNIP mendorong diadakannya kongres pemuda untuk mewadahi para pemuda dan

---

<sup>35</sup> Anderson, *Ibid.* h. 281, lihat juga footnote nomor 36 pada halaman sama yang mengutip pernyataan Nasution yang merinci peranan dan afiliasi politik para pemimpin Pepolit.

<sup>36</sup> Sangat diragukan apakah Amir benar memahami fungsi opsir politik dalam tentara merah dan karakteristik pemerintahan Stalin yang mendukung keberhasilan unit semacam itu sangatlah berbeda dengan citra pemerintah yang ingin dibuat oleh Sjahrir. Lihat Anderson, *Ibid.*, h. 278-281

menyatukan pandangan politik dan visi perjuangannya. Untuk mempersiapkan kongres besar tersebut sebagaimana pada tanggal 25 Oktober 1945 diumumkan, akan diadakan kongres di Yogyakarta pada 10-11 November 1945, yang dihadiri oleh perwakilan dari API Jakarta, Gerpri Yogyakarta, Pelopor Jakarta, AMRI Jawa Tengah, PRI Surabaya, PRI Bandung, IPI Jakarta, dan Staf Wartawan Kementerian Penerangan. Selain itu juga kongres akan dihadiri oleh para pemuda lintas agama.<sup>37</sup>

Tujuan dari kongres ini adalah untuk menyatukan persepsi dan meleburkan organisasi – organisasi pemuda yang tersebar tak beraturan menjadi satu wadah dengan satu kepemimpinan. Namun kemudian hanya tujuh organisasi yang sepakat untuk membentuk satu organisasi terpadu, yaitu API, PRI, AMRI, Gerpri, AMKA (Kereta Api), AMPTT, dan AMGL (gas dan listrik). Sesuai kesepakatan kongres bahwa sosialisme merupakan bentuk politik yang saat itu cocok dipakai oleh republik, maka ketujuhnya melebur menjadi Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang memperjuangkan sosialisme di Indonesia.<sup>38</sup>

Meskipun berisi para tokoh utama gerakan pemuda<sup>39</sup>, namun jumlah anggota Pesindo dari tujuh organisasi tersebut kalah jumlah oleh anggota dari organisasi

---

<sup>37</sup> Anderson. *Ibid.* h. 283.

<sup>38</sup> Rosihan Anwar, *Op. Cit.*, Hal. 61; Anderson.*Ibid.*, h. 284.

<sup>39</sup>Untuk daftar kepemimpinan PESINDO, Lihat AD/ART PESINDO sebagaimana tertera dalam Arsip Kementerian Penerangan dalam Katalog Jogja Documenten, Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip yang sama dapat dilihat pula lebih lengkapnya dalam karya Norman Joshua Soelias, "PESINDO : PEMUDA SOSIALIS INDONESIA 1945-1950", Hal. 42-56. Isi Laporan sama namun, dalam buku ini diambil versi laporan intelijen NEFIS yang dilengkapi analisis Belanda terhadap PESINDO dalam *Archief Procureurs – generaal bij her Hoogerechtschhof N.I.*, Den Haag.

lainnya. Hal ini menyebabkan Pesindo gagal mempersatukan kelompok pemuda dalam satu wadah. Pesindo justru berdiri menjadi sebuah organisasi berdaulat diluar kongres.<sup>40</sup> Sebagai kompromi, pada akhirnya di konferensi yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan setidaknya enam orang menteri itu, disepakati bahwa Pesindo dan lima belas organisasi lainnya yang menolak bergabung dengan Pesindo akan membentuk suatu federasi yang bernama Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Dengan dibentuknya organisasi baru ini, maka sebelum Sjahrir memegang kekuasaan, dia sudah lebih dahulu menguasai pemuda melalui Amir Sjarifuddin dan Kongres Pemuda yang diprakarsai oleh Amir. Kedepannya Pesindo berkembang menjadi semacam pengawal pribadi bagi sang Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan karena kedekatan organisasi ini dengan Partai Sosialis. Ujian untuk BKPRI yang baru terbentuk ini tiba pada hari yang sama. Selagi sidang kongres sedang hangat membahas tujuan BKPRI dan AD/ART nya, datang kabar bahwa pertempuran pecah di Surabaya. Pemuda Jawa Timur segera undur diri dari kongres dan kembali ke medan tempur di Surabaya.<sup>42</sup> Kongres kemudian mempercepat sidangnya dan mengangkat Wikana, Chaerul Saleh, dan Sumarsono sebagai Ketua BKPRI.<sup>43</sup> Program yang diinisiasi Pesindo tidak diterima oleh mayoritas Kongres dan

---

<sup>40</sup> Norman Joshua Soelias. 2016. *Pesindo : Pemuda Sosialis Indonesia*. Serpong : Marjin Kiri. h. 41-42

<sup>41</sup> Rosihan Anwar, *Op. Cit.*, h. 61.

<sup>42</sup> Rosihan Anwar. *Ibid.*

<sup>43</sup> Anderson, *Op. Cit.*, h.285-288 ; Baik Wikana, Chaerul Saleh, maupun Sumarsono memiliki kedekatan dengan Sjahrir sejak masa pendudukan Jepang. Ketiganya merupakan kelompok pemuda

yang keluar sebagai program kongres hanya sesuatu yang bersifat umum dengan penekanan pada perlawanan terhadap sekutu.

Usai Kongres, Pesindo menjadi makin dekat dengan pemerintahan, terutama sekali ketika Sjahrir menjadi Perdana Menteri. Undangan yang diterima oleh Pesindo pada Januari 1946 untuk menghadiri rapat kabinet pertama makin membuktikan hal tersebut. Belum lagi slogan anti Jepang yang terus menerus digalakkan oleh Pesindo yang sejalan dengan program pemerintahan Sjahrir.<sup>44</sup>

Dengan adanya Pesindo, maka pemerintahan Sjahrir memegang kendali atas sebagian gerakan pemuda. Kontrol atas Pesindo ini sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup kabinet Sjahrir. Pesindo merupakan sebuah organisasi pemuda yang sangat terorganisir, yang paling lengkap persenjataannya, dipimpin oleh para pemuda berpengalaman, dan memiliki disiplin yang sangat tinggi, yang bisa dibandingkan dengan tentara.

Menjadi sebuah rahasia umum bahwa Pesindo baik secara langsung atau tidak, dipersenjatai oleh pemerintah.<sup>45</sup> Klaim ini sebenarnya tergolong ekstrim karena tidak pernah ada bukti bahwa pemerintah mempersenjatai Pesindo. Akan tetapi Ben Anderson bersikeras bahwa sangat logis untuk mempercayai hal tersebut mengingat kedekatan antar organisasi dan Partai Sosialis serta kondisi yang sangat tiba – tiba

---

Menteng 31 yang berada dibawah pengaruh Sjahrir melalui Djohan Sjahruzah. Lihat karya J.D. Legge, *Op. Cit*, hal. 80

<sup>44</sup> Anderson, *Ibid.*, h. 286

<sup>45</sup> Aderson, *Ibid.*, h. 288

bahwa organisasi yang melebur dibawah Pesindo, awalnya berupa organisasi minim persenjataan, dalam waktu singkat berubah menjadi suatu kesatuan bersenjata yang elit usai terbentuk, dan perwakilannya diundang ke rapat kabinet yang tertutup.<sup>46</sup>

Organisasi pemuda yang lain sibuk terlibat dengan pertempuran sehingga untuk sementara waktu dapat dengan pasti dikatakan BKPRI dikontrol oleh Pesindo, dan dengan demikian, Pemerintah mengontrol para pemuda. Sehingga, meski kekecewaan jelas terpampang saat kabinet pertama diumumkan karena wakil pemuda dilengserkan, kekecewaan tersebut tak berlangsung lama, karena dalam Pesindo, tokoh – tokoh garis keras pemuda (minus pemuda Persatuan Perjuangan bentukan Tan Malaka) memiliki kontrol yang cukup dan tidak langsung pada pemerintah, namun memiliki independensi dalam menjalankan organisasinya sendiri, sesuatu yang tidak diberikan Sjahrir dan Amir pada tentara.

#### **D. Republik Mundur Dari Jakarta**

Surabaya, Bandung, Semarang, dan kota – kota besar lainnya bergolak pasca proklamasi dikumandangkan. Jakarta, kota dimana proklamasi dikumandangkan juga tak ketinggalan. Meskipun menjadi pusat kekuasaan Sekutu, Jakarta tidak serta merta menjadi tempat aman. Baku tembak kerap terjadi, terutama semenjak serdadu Belanda ikut mendarat di Tanjung Priok.

---

<sup>46</sup>Anderson. *Ibid.*

Keadaan personalia militer Inggris yang sangat terbatas membuat mereka jarang mengadakan patroli di jalanan Jakarta. Karena Jakarta juga merupakan ibukota Republik, maka Inggris mengharapkan bahwa pemerintah Republik bisa ikut menumbang bantuan untuk menjaga keamanan ibukota.

Namun, aksi di berbagai daerah Jakarta yang dipenuhi oleh laskar yang tidak terkontrol oleh pemerintah ikut mempengaruhi keadaan keamanan dalam ibukota. Presiden dan Perdana Menteri biasa bepergian sendirian atau hanya ditemani seorang ajudan, dan tanpa pengawalan. TKR tidak memiliki perwakilan di Jakarta, dan kesatuan militer Tangerang sibuk mengurus permasalahan di kota nya sendiri.

Persoalan ini sebenarnya bisa diatasi jika Republik setidaknya memiliki kesatuan kepolisian yang kuat di ibukota. Hanya saja, kepolisian ibukota tercerai berai dan berantakan organisasinya. Usaha untuk membentuk kepolisian yang terorganisir pertama kali dilangsungkan pada 27 September 1945, dua bulan sebelum pemerintahan Sjahrir berdiri.

Seorang perwira kepolisian pada era Hindia Belanda dan pendudukan Jepang, Sukanto Tjokrodiatmodjo, berinisiatif untuk menemui *Keimubucho*, komandan militer Jepang yang bertugas sebagai kepala sekolah kepolisian Sukabumi tempat Sukanto sedang belajar, dan menegosiasikan agar Jepang menyerahkan sekolah tersebut pada Republik. Akan tetapi *Keimubucho* menolak karena Jepang tidak lagi memiliki kuasa atas segala putusan di Republik. Sukanto kemudian memutuskan pergi

ke Jakarta untuk melapor langsung pada Presiden perihal pembentukan kepolisian Republik yang baru.<sup>47</sup> Pada tanggal 29 September 1945, Presiden atas nasihat dari Iwa Kusumasumantri dan Sartono setuju untuk mendirikan Kepolisian Negara Indonesia dan menunjuk Sukanto sebagai kepala kepolisian yang pertama.<sup>48</sup>

Usai pelantikan, terjadi huru – hara di Sekolah Polisi Sukabumi yang disebabkan usaha Jepang untuk menduduki sekolah tersebut dan mengambil alih gudang senjatanya. Usaha tersebut gagal dan polisi republik yang baru terbentuk memenangkan pertempuran pertamanya. Demi efisiensi kepemimpinan, Soekanto menugaskan Inspektur Bustami Aman sebagai kepala sekolah yang baru. Dengan pengangkatan tersebut, para perwira kepolisian senior yang ada di sekolah, segera berangkat ke Jakarta untuk menyusun pembentukan kepolisian yang baru.<sup>49</sup>

Setelah selesai mengadakan reorganisasi pusat, keluar keputusan pemerintah pada 1 Oktober 1945 yang meletakkan Kejaksaan dan Kepolisian dibawah komando masing – masing Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, pengaturan yang dilakukan Jepang pasca revolusi dengan menciptakan suatu Departemen Keamanan yang membawahi dua organisasi ini, dibatalkan, dan kedua organisasi dikembalikan pada kementerian masing – masing sebelum perang.

---

<sup>47</sup> Awaloeddin Djamin.2016. *Jenderal Polisi Soekanto Tjokrodiatmodjo*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas. h. 50

<sup>48</sup> Pencalonan Sukanto ini sejatinya adalah karena alasan praktis. Raden Soemarto kepala kepolisian Pekalongan merupakan seorang polisi yang lebih senior dan berpengalaman dibanding Sukanto, akan tetapi, pecahnya peristiwa tiga daerah membuat Soemarto ditangkap dan akhirnya hanya Soekanto yang tersedia sebagai perwira polisi senior. Wawancara. Lihat Awaloeddin Djamin. *Ibid*. h. 51

<sup>49</sup> Awaloeddin Djamin. *Ibid*. h. 52

Pada 10 November 1945 pecah pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran yang kacau tersebut, Inggris menuduh kepolisian Republik di Surabaya, yang berada dibawah pimpinan Mohammad Jasin<sup>50</sup> sebagai salah satu dalang penggerak kerusuhan di Surabaya. Tuduhan ini terbawa ke Jakarta, dan Inggris awalnya menolak bekerjasama dengan Kepolisian Republik di Jakarta dan cenderung menganggap mereka ekstrimis.

Usai perundingan awal antara pemerintahan baru pimpinan Sjahrir dengan Van Mook dan Jenderal Christison dari Inggris, maka diputuskan bahwa demi menjaga keamanan kota, Polisi Militer Inggris dan Australia harus bekerja sama dengan kepolisian Republik. Polisi Militer Sekutu mengizinkan unit kepolisian berseragam dan unit reserse tanpa seragam namun memakai tanda pengenal untuk memegang senjata dan menjaga keamanan kota.<sup>51</sup>

Dalam perjanjian tersebut prajurit Belanda yang berada dibawah kendali NICA (Netherlands Indies Civil Administration) dilarang masuk ibukota tanpa seizin sekutu dan pemerintah republik. Diatas kertas, jika prajurit Belanda tidak ikut campur, maka Polisi Militer dan Kepolisian Republik mampu mengatasi persoalan yang ditimbulkan para laskar diluar ibukota. Akan tetapi, seperti yang kemudian terjadi seterusnya, pemerintah Belanda melanggar perjanjian tersebut dan membiarkan

---

<sup>50</sup>Nantinya mendirikan Brigade Mobil, kesatuan khusus kepolisian yang masih bertahan hingga saat ini. Jalan didepan markas komando Brimob di daerah Depok diberikan nama Jl. M. Jasin. Lihat *Ibid.* h. 56

<sup>51</sup>*Ibid.* h. 57

prajuritnya masuk ibukota dengan rencana untuk membantu keamanan pemerintah NICA di Jakarta.

Keberadaan prajurit NICA di Jakarta justru malah memicu kerusuhan. Para pemuda pendukung Sjahrir yang biasa mencorat – coret dinding ibukota dengan slogan kemerdekaan tanpa gangguan dari Polisi Militer maupun kepolisian Republik sekarang mulai ditangkapi, dan tidak jarang ditembaki.<sup>52</sup> Bukan sekali pula para prajurit NICA ini memancing kerusuhan dengan para pemuda Jakarta, yang berujung pada bentrok bersenjata di berbagai tempat di Jakarta.

Selain menangkapi dan membunuh para pemuda prajurit NICA juga secara sistematis mengincar para pimpinan Republik yang tanpa pengawasan. Perdana Menteri Sjahrir hampir ditembak mati oleh prajurit NICA, jika saja pistolnya tidak macet. Mobil Sjahrir dihentikan dan meskipun usahanya untuk memberitahu bahwa dia adalah Perdana Menteri Republik dilakukan. Hal tersebut tidak digubris, maut meleset dari Sjahrir, setelah salah satu regu patroli Inggris lewat dan mengenalinya. Dia pun dibebaskan.<sup>53</sup>

Kejadian yang tak jauh berbeda ikut menimpa Presiden Soekarno. Supir pribadinya Tukimin sedang mengendarai mobil presiden ketika NICA berpikir bahwa sang Presiden ada di mobil tersebut, dan kemudian menabrakkan truk ke mobil

---

<sup>52</sup> Rosihan Anwar. *Op. Cit.*, h. 27-36. Para pemuda ini adalah orang – orang urban yang biasanya adalah mahasiswa. Lih. *Ibid.* h. 18-19 untuk susunan pemuda yang terlibat dalam aksi mencorat-coret ini, kelompok pendukung Sjahrir merupakan kelompok pemuda jalan Maluku, dan pemuda Menteng 31 yang kebanyakan nantinya bergabung dengan Pesindo.

<sup>53</sup> Rosihan Anwar. *Ibid.*, h.99. ; *The Northern Star*, 28 Desember 1945

tersebut. Mobil presiden hancur, tapi Tukimin selamat karena segera dibawa ke rumah sakit oleh pemuda.<sup>54</sup>Presiden terpaksa berpindah – pindah rumah tinggal pada malam hari karena begitu banyak usaha pembunuhan terhadap dirinya. Selain itu,kejadian lain menimpa Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin yang mobilnya ditembaki.<sup>55</sup>

Pada 27 Desember 1945, Inggris melancarkan operasi *pounce* untuk mengambil alih Jakarta dari tangan Republik. Operasi ini berujung dengan penangkapan 743 orang yang diduga ekstrimis, separuhnya adalah petugas kepolisian Republik.<sup>56</sup>Dengan kepolisian yang unitnya makin menipis dan demi menyelamatkan komando pusat kepolisian yang tersisa, Soekanto mengeluarkan perintah kepada Inspektur Mardjaman Tjokrodiredjo untuk mengorganisasikan rute pelarian untuk Presiden dan Wakil Presiden.<sup>57</sup>Sultan Yogyakarta telah menawarkan pada republik untuk menggunakan kotanya sebagai ibukota baru Republik dan kesanalah tujuan pengunduran pemerintah karena Jakarta makin tidak aman.

Pada tanggal 3 januari, pukul 18.00 WIB, rombongan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga dengan pengawalan Polisi Istimewa menaiki sebuah kereta yang sengaja diparkirkan di rel kereta dibelakang rumah Presiden di Pegangsaan Timur No. 56. Lima petugas polisi berseragam yang pro Indonesia membiarkan kereta lewat, dan kemudian ketika mencapai Stasiun Manggarai, kereta diperiksa oleh

---

<sup>54</sup> Cindy Adams. *Op. Cit.*,h. 231

<sup>55</sup> Rosihan Anwar.*Op. Cit.*, h. 99

<sup>56</sup> Awaloeddin Djamin. *Op. Cit.*,h. 59

<sup>57</sup>Awaloeddin Djamin. *Ibid.*, h. 63

segerombolan tentara Belanda. Karena gerbong belakang tempat Presiden dan para pengawalnya dibiarkan dalam keadaan gelap, maka para tentara menduga gerbong tersebut kosong. Rombongan bisa bernafas lega ketika kereta dengan aman melintasi Jatinegara dan masuk ke wilayah Republik di Karawang, Cirebon, Purwokerto, dan terakhir Yogyakarta.<sup>58</sup>

Dalam rombongan tersebut, Amir Sjarifuddin ikut. Dia meletakkan posisinya sebagai Menteri Penerangan yang mengharuskannya berada di Jakarta. Sjahrir memutuskan tinggal bersama walikota Soewirjo, dan pada tanggal 4 Januari 1946 mengeluarkan pengumuman bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa menteri telah pindah ke Yogyakarta. Dalam pengumuman yang sama, Pemerintahan Sjahrir mengangkat Rasjidi sebagai Menteri Agama, M. Natsir sebagai Menteri Penerangan menggantikan Amir, dan Supeno sebagai Pemimpin Balai Pemuda di Jakarta.<sup>59</sup>

Meskipun kemudian muncul banyak pertanyaan mengapa Sjahrir tidak ikut ke Yogyakarta, langkah tersebut sebenarnya cukup logis juga. Jakarta meskipun dikuasai Inggris tetaplah pintu yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. Dan kementerian luar negeri tetap tinggal di tempat tersebut untuk melanjutkan negosiasi. Ada kekhawatiran pula bahwa segera setelah mencapai Yogyakarta, popularitas Soekarno akan memuncak dan berujung pada tidak dianggapnya Sjahrir. Hal yang kemudian menjadi kenyataan. Masyarakat Jawa memang masih terpicat dengan

---

<sup>58</sup> Awaloeddin Djamin. *Ibid.*, h. 64-65.

<sup>59</sup> Rosihan Anwar. *Op. Cit.*, h. 103.

Soekarno, dan ketika sang Presiden tiba di Yogyakarta, sambutan bak raja diterimanya dari rakyat, para pejabat pemerintah, dan TKR yang saat itu sudah berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).<sup>60</sup>

Sjahrir praktis terisolasi secara politik dalam hubungan dalam negeri. Banyak politisi pindah ke Yogyakarta, dan musuh – musuh politiknya, terutama Subardjo telah membangun basis politik di sana. Amir yang masih memegang posisi Menteri Pertahanan terpaksa dikirim ke Yogyakarta untuk mempertahankan kredibilitas pemerintahan Sjahrir disana, dan juga untuk mengontrol tentara yang sekarang rentan terhadap manipulasi.

Hubungan militer dan sang perdana menteri makin lama makin buruk, dan hanya soal waktu sebelum akhirnya militer ikut memainkan peranan dalam kejatuhan Sjahrir. Dibalik kabut politik Yogyakarta dan Jakarta, perlahan Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan muncul. Membuka babak kedua dari sejarah Indonesia setelah kemerdekaan.

### **E. Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan**

Ibrahim gelar datuk Tan Malaka kemungkinan besar lahir pada tahun 1894 di sebuah desa kecil Pandan Gadang tak jauh dari Suliki di Minangkabau. Sejak akhir tahun 1913 sampai tahun 1915 Tan Malaka tinggal di Haarlem dan dirasakannya demokrasi dan kebebasan di Belanda sangat berbeda dengan kehidupan bertata tertib

---

<sup>60</sup> Mrazek. *Op. Cit.*, h. 525.

ketat di Hindia. Ia terjun aktif dalam organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia, dan selalu bersimpati pada sosialisme dan komunisme<sup>61</sup>. Sepulangnya ke Hindia, Tan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia.

Tan mengasingkan diri pada tahun 1922, sebagai akibat dari hukuman yang dijatuhkan pemerintah Kolonial Belanda. Namun, dari jarak jauh ia turut campur dalam perkembangan PKI, dimana pada tahun 1924 ia menulis dalam bahasa Belanda sebuah buku yang berjudul, *Naar de 'Republiek-Indonesia'*.<sup>62</sup>

Tan Malaka bersama Subakat dan Djamaludin Tamin ia mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok pada Juli 1927 karena ketidakpercayaannya baik terhadap Komintern maupun Pemerintah Soviet di Moskow yang menyokong pemberontakan prematur PKI tahun 1926. Tan memilih menempatkan nasionalisme Indonesia sebagai ideologi utama partainya, meskipun Komunisme tetap dipertahankan sebagai pedoman aksi.

Pada tahun 1930 Subakat ditangkap oleh polisi Thailand dan diserahkan pada pemerintah Batavia. Sementara, sisa jaringan kecil partainya di Jawa dan Sumatera dihancurkan. Djamaludin Tamin ikut ditangkap pada tahun 1932 oleh Polisi Inggris di Singapura.

---

<sup>61</sup> Harry A. Poeze. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, Dan Revolusi Indonesia: Jilid 1, Agustus 1945-Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. xv.

<sup>62</sup> Buku ini dikemudian hari menjadi alasan Tan diberi gelar "Bapak Republik Indonesia".

Pada tahun 1942 setelah Jepang menduduki Singapura dan Hindia, Tan Malaka kembali ke tanah kelahirannya. Di sebuah kampung di Jakarta ia menyewa sebuah rumah kecil. Setiap hari dengan nama Ilyas Husein ia pergi ke perpustakaan terkemuka di Jakarta dan menulis sebuah buku yang kemudian dianggap sebagai mahakarya yaitu: Madilog- gabungan dari materialisme, dialektika, dan logika.<sup>63</sup>

Setelah setahun karena uangnya menipis dan kondisi di Jakarta tidak lagi aman ia menerima pekerjaan sebagai pengawas di pertambangan batubara di Bayah, Pantai Selatan Banten. Tidak lama menjelang Jepang menyerah Tan Malaka kembali masuk Jakarta, kali ini sebagai utusan pemuda Banten untuk ikut memberi bentuk pada Indonesia yang baru merdeka.<sup>64</sup>

Tan berhasil membuka kontak dengan Sukarni dan Chaerul Saleh pada tanggal 15 Agustus 1945. Tan berhasil meyakinkan mereka bahwa sejatinya proklamasi harus segera dilaksanakan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Tan tetap menggunakan nama Husein. karena Jepang telah mengendus keberadaan Tan Malaka di suatu tempat di Jawa. Kedua tokoh pemuda tersebut juga tidak menyadari kalau mereka sedang berhadapan dengan Tan Malaka yang legendaris itu.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>*The Daily Mercury*. 5 September 1946; Dalam laporan yang bertajuk "Malaka, Man behind Indonesian Political Strife", latar belakang kehidupan Tan Malaka sebelum kemerdekaan dituliskan dengan cukup detil dan sebagian besar sejaris dengan penelitian Poeze. Beberapa kisah lainnya merupakan hasil mistifikasi Tan di kalangan pemimpin republik, yang menjadi sumber kisah ini.

<sup>64</sup>Poeze. *Ibid.*, h.xix.

<sup>65</sup>Poeze. *Ibid.*, h.13.

Selama seminggu kemudian ia tak berhasil menghubungi para tokoh pemuda, padahal ia bermaksud memberi tahu kepada mereka bahwa dialah Tan Malaka. Subardjo segera memanggil Iwa Kusumasumantri untuk berkenalan dengan Tan Malaka. Pada siang harinya Diah pergi ke rumah Subardjo dan bertemu kembali dengan Tan disana. Subardjo sendiri yang mengenalkan kepada Diah bahwa nama asli seseorang yang dia kenal sebagai Husein, seorang pemuda Banten yang mampir ke rumahnya ternyata bernama asli Tan Malaka. Selain itu Tan juga diperkenalkan kepada Gatot Tarunamihardjo beserta dr. Buntaran Atmodjo yang juga pernah belajar di Belanda. Dan secara kebetulan bertemu juga di rumah itu dengan dr. Muwardi dan Sudiro, para pemimpin barisan pelopor serta Latief Hendraningrat yang lebih dahulu mengenalnya sebagai Husein. Tidak lama setelah pertemuan itu Tan juga diperkenalkan kepada asisten komandan tinggi Jepang di pulau Jawa Kolonel Nishijima yang juga merupakan mentor bagi kelompok Subardjo.<sup>66</sup>

Dengan demikian Tan Malaka telah memiliki basis politik sendiri di Jakarta pasca proklamasi. Kelompok ini kedepannya akan menjadi basis kekuatan Tan untuk membentuk persatuan perjuangan dan juga usahanya menentang kebijakan pemerintahan Sjahrir. Pada tanggal 22 Agustus KNI memutuskan untuk membentuk KNI Pusat. Sukarno dan Hatta berunding untuk menentukan anggota-anggotanya. Pada tanggal 27 Agustus sebanyak 132 laki-laki dan 5 perempuan diangkat. Komposisi ini

---

<sup>66</sup>Poeze. *Ibid.* h. 38-39. Kelompok Subardjo ini biasa disebut sebagai kelompok Kaigun (Angkatan Laut Jepang) karena semua anggotanya dalam satu dan lain hal pernah bekerja di kantor perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Oleh karena itu kelompok ini sangat dekat dengan para petinggi AL Jepang di Jakarta.

kebanyakan diisi oleh Angkatan Tua para politisi, Mantan Pejabat Pemerintah, dan Teknokrat. Islam kurang diwakili karena anggotanya kurang dari 20 orang, sementara pemuda hanya mendapat sedikit diatas 20 orang. Termasuk didalam badan ini dua orang baru dari angkatan tua namun bersih dari noda Jepang yaitu Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.<sup>67</sup>

Pada hari yang sama pemerintah membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) atas desakan Sukarno yang menginginkan adanya suatu partai negara yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pimpinan umumnya diisi oleh orang-orang seperti Gatot, Iwa, dan Sayuti Melik, dengan Sukarno dan Hatta sebagai pemimpin dan wakil pemimpin besar. Struktur organisasi ini mirip dengan Jawa Hokokai yang merupakan organisasi kebaktian bentukan Jepang. Kepemimpinan PNI ditambahkan dengan sejumlah tokoh pemuda seperti Sukarni dan Chaerul Saleh serta anggota kelompok Kaigun namun tanpa Subardjo.

Sjahrir menolak keberadaan PNI karena strukturnya sangat mencerminkan fasisme yang bergantung pada negara satu partai seperti halnya Jerman dan juga totaliter ala Uni Soviet. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah baru dituduh oleh Sekutu terutama Belanda sebagai pemerintah boneka bentukan Jepang yang kemudian dapat berujung pada kehancuran pada republik yang baru ini. Sjahrir berpendapat bahwa kerjasama dengan sekutu dibutuhkan demi kelangsungan hidup republik. Alhasil, pada tanggal 31 Agustus 1945 PNI dibubarkan.

---

<sup>67</sup>Poeze. *Ibid.*, h.46.

Pada subbab sebelumnya telah dibahas bahwa kondisi kota Jakarta pasca proklamasi dan kedatangan sekutu, kacau balau. Baik Presiden maupun Perdana Menteri berada dalam kondisi yang tidak aman. Pada tanggal 9 September Sukarno mengadakan pertemuan dengan Tan Malaka di rumah dokter pribadinya yaitu dr. Suharto. Sayuti Melik menjadi perantara dalam pertemuan tersebut, dimana Sukarno menunjuk Tan Malaka sebagai penggantinya jika keadaan buruk menimpa dirinya.<sup>68</sup>

Pada tanggal 30 September 1945 di kediaman Subardjo, Sukarno berbicara dengan Tan, Iwa, dan Gatot kemudian sepakat untuk membuat sebuah testament politik yang didalamnya Sukarno dan Hatta menunjuk Tan Malaka sebagai pengganti mereka dalam hal mereka tidak bisa menjalankan tugas. Sukarno kemudian menuju ke rumah Hatta dan meminta saran Hatta atas teks testament politik tersebut. Hatta menolak menandatangani namun menawarkan jalan keluar. Hatta meminta agar para pengganti yang direncanakan berasal dari empat aliran besar politik yang ada. Tan Malaka ditunjuk sebagai wakil aliran paling kiri, Sjahrir untuk golongan kiri tengah, Wongsonegoro sebagai wakil kanan dan golongan feodal, serta Sukiman sebagai wakil Islam.

Keesokan harinya Sukarno dan Hatta mengunjungi rumah Subardjo untuk membicarakan testament politik tersebut. Hatta mengingatkan Tan bahwa Tan masih merupakan figur kontroversial di kelompok kiri sendiri, maka lebih baik bagi Tan

---

<sup>68</sup>Poeze. *Ibid.*, h.57.

untuk melakukan perjalanan keliling Jawa selain untuk mengenalkan diri kepada rakyat, juga untuk menjajaki sejauh mana pengaruhnya. Usul Hatta tersebut diterima, akan tetapi karena Sukiman sudah berangkat ke Jawa Tengah dia digantikan oleh Iwa atas dasar hubungan persahabatannya dengan Sukiman dan politik Islamnya dimasa lalu. Subardjo ditugasi memberikan teks itu pada Sjahrir dan Wongsonegoro.<sup>69</sup>

Akan tetapi, Sjahrir dan kelompoknya mengatakan bahwa mereka tidak pernah diberitahu mengenai testamen ini. Ben Anderson mengkritisi pernyataan kelompok Sjahrir sebagai sesuatu yang sangat meragukan karena pastilah Sjahrir diberitahukan oleh Hatta yang dekat dengan dirinya.<sup>70</sup> Akan tetapi kritik ini disangsikan oleh Poeze yang mengutip pernyataan Hatta pada tahun 1974 bahwa ketika sepuluh hari setelah peristiwa tersebut Sjahrir mengaku pada Hatta bahwa ia tidak tahu sama sekali. Pada bulan Februari 1946 Wongsonegoro memberikan jawaban yang sama pada Hatta.<sup>71</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Subardjo bermain politik dibelakang layar dan berusaha mendapatkan kompensasi atas penggantian Tan Malaka sebagai calon tunggal dalam testamen tersebut. Subardjo bahkan sengaja untuk menahan informasi bahwa Tan Malaka ada di rumahnya. Dengan demikian Subardjo memiliki kontrol terhadap Tan Malaka, hal ini terjadi juga karena kehendak Tan Malaka untuk merahasiakan keadaan dirinya.

---

<sup>69</sup>Poeze. *Ibid.*, h.60.

<sup>70</sup> Anderson. *Op.Cit.* h., 309.

<sup>71</sup>Poeze. *Op.Cit.*, h.62. lihat kutipan nomor 125 untuk keterangan lebih lanjut mengenai wawancara Hatta, Subadio Sastrosatomo, dan wawancara Kahin terhadap Wongso Negoro pada tahun 1948.

Namun, dengan pengumuman Jenderal Christison dari Inggris bahwa pemerintahan Sukarno dijamin dan diakui oleh sekutu kemudian juga akibat pertemuan terbuka pertama antara Sukarno dan Van Mook pada tanggal 23 Oktober testamen tersebut menjadi tidak relevan.<sup>72</sup> Kisah testamen ini berakhir dengan keberangkatan Sukarno dan Hatta ke Jogjakarta pada 4 Januari 1946. Selain testamen dengan empat orang pengganti, segera beredar pula testamen yang menyebut Tan Malaka saja sebagai pengganti. Hatta menuduh dengan berdasarkan hasil penyelidikan polisi dan kejaksaan tentara bahwa aktor dibalik beredarnya testamen kedua adalah Chaerul Saleh.<sup>73</sup>

Dihari yang sama dengan tanggal perginya mayoritas republik dari Jakarta, di Purwokerto dibuka sebuah sidang besar untuk membahas masalah perjuangan rakyat seluruh Indonesia. Tidak ada pemberitaan satupun di pers, semua peserta mendapat undangan pribadi dari panitia atau melalui organisasi yang diwakilinya. Sekitar 300 orang menjadi perwakilan dari empat puluh organisasi yang mencakup ormas, dan badan perjuangan.

Sidang tersebut dibuka dengan laporan yang diberikan perwakilan dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Laskar Rakyat Djakarta Raya. Dalam laporan – laporan tersebut, disepakati bahwa pemerintah terlalu lembek (dalam hal ini pemerintahan Sjahrir) dalam menghadapi “tipu daya” Inggris. Hal ini dibuktikan

---

<sup>72</sup> Anderson. *Op.Cit.*, h. 310.

<sup>73</sup> Poeze. *Op.Cit.*, h.65.

dengan perintah yang datang dari pemerintah pada rakyat untuk tidak memprovokasi atau bahkan melawan Inggris maupun Belanda. Menurut para pelapor, karena perintah ini, akhirnya rakyat terpecah belah.<sup>74</sup>

Meskipun kehati – hatian pemerintah saat itu sangat masuk akal jika dipertimbangkan secara logis, namun bagi pemuda dan badan perjuangan, tindakan pemerintah tergolong lembek dan tidak responsif. Pandangan ini memang sangat bertolak belakang. Pada satu sisi, pemerintah tidak salah ketika mempertimbangkan kekuatan sekutu yang bisa membunuh Indonesia dan mengubur pemerintahan republik yang baru berdiri beberapa bulan itu jika sekutu mau atau “terprovokasi”.

Pada lain sisi, pemuda dan badan perjuangan juga tidak salah pada kebencian mereka pada sekutu dan tindakan pemerintah yang dianggapnya “lembek”. Terutama sekali karena mereka sering berhadapan langsung dengan provokasi maupun serangan langsung sekutu, maka dalam pikiran para pemuda ini hanya ada pertanyaan cara efektif melawan sekutu secara fisik. Dalam pikiran ataupun pandangan para pemuda, tidak menjadi soal kalau mesin perang milik sekutu itu masif dan modern, bagi mereka lebih baik sekutu angkat kaki atau mereka gugur bersama republik ini.

Setelah masuk gilirannya untuk berpidato, Tan tidak lagi berminat mengkritisi pemerintah, karena para pelapor sudah detil dalam memberi kritik pada

---

<sup>74</sup>Poeze. *Ibid.*, h. 209

pemerintahan. Tan memfokuskan pidatonya pada persatuan bangsa dan syarat merdeka 100%. Keesokan harinya dia berpidato panjang lebar selama beberapa jam terkait hubungan revolusi Indonesia dengan situasi politik luar negeri.

Usai memaparkan idenya membentuk Persatuan Perjuangan yang “bukan mencari kursi parlemen, tapi untuk merdeka 100%”<sup>75</sup>, Tan menyerukan tuntutan Persatuan Perjuangan pada pemerintah yang secara garis besar berisi :Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%, Pemerintahan Rakyat menyesuaikan haluan pemerintah dengan kemauan rakyat, Tentara Rakyat menyesuaikan haluan tentara dengan kemauan rakyat, melucuti tentara Jepang, mengurus tawanan bangsa eropa, menyita dan mengoperasikan pertanian milik musuh, menyita dan mengurus perindustrian<sup>76</sup>

Meskipun tidak menyebutkan langsung perihal kabinet atau menentang program kabinet. Apa yang dituntut oleh Tan Malaka jelas bertentangan dengan program dan haluan pemerintahan Sjahrir. Menurut Anderson, pasal 2, 3, dan 4, tidak menjadi kontroversi dan kehebohan karena bentuknya yang terlalu samar, namun kasusnya berbeda dengan pasal lainnya.<sup>77</sup> Pasal yang pertama menentang perundingan damai yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak Sekutu, atau usaha – usaha mencoba menarik simpati Sekutu dalam perundingan dengan Belanda.

---

<sup>75</sup> Poeze. *Ibid.*, h. 215-217. Lihat Hal.217 untuk alasan program dan tujuan Persatuan Perjuangan.

<sup>76</sup> Anderson. *Op. Cit.*, h. 321

<sup>77</sup> Anderson. *Ibid.*

Pasal keenam dan ketujuh jelas bertentangan dengan janji pemerintah untuk mengembalikan otoritas bisnis dan industri dari berbagai perkebunan dan pabrik pada pemilik lamanya. Maksud pemerintah disini adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah bangsa biadab yang seenaknya mengambil milik orang lain, sehingga negara – negara sekutu maupun negara internasional lainnya dapat melihat pemerintah republik sebagai suatu unit politik yang sah, bukan sebagai sekelompok perampok sebagaimana digambarkan oleh Belanda. Akan tetapi janji ini dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat, yang seharusnya mendapatkan tanah di mana mereka dulu diperbudak. Baik Sjahrir maupun Tan sama – sama rasional dalam hal ini. Keduanya memiliki akar pemikiran Sosialis, dan dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan juga perbedaan.<sup>78</sup>

Dalam satu sisi Sjahrir tidak menolak pendistribusian tanah untuk diberikan kembali pada rakyat, namun tindakan tersebut dinilai sangat tidak praktikal dan berpotensi merusak hubungan republik dan sekutu yang memang sudah memanas. Namun Tan bersedia mengorbankan hubungan diplomatik tersebut demi kemerdekaan penuh. Sesuatu yang heroik dalam teori, namun akibat praktikalnya masih dipertanyakan.

Dan lagi menurut Anderson, poin paling berbahaya untuk kelangsungan hidup kabinet ada pada poin nomor lima. Maksud “mengurus” dalam poin ini bermakna

---

<sup>78</sup>Komunisme, yang menjadi basis aksi Tan Malaka untuk mencapai tujuan Nasionalisme nya, juga berakar pada pemikiran sosialis. Sjahrir yang kemudian berkembang menjadi pemikir Sosial Demokrat yang moderat, pada masa mudanya juga terlibat dalam gerakan komunisme dan anarkisme untuk beberapa waktu. Lihat Bag. Pendahuluan dari penelitian ini.

banyak. Jika dikombinasikan dengan kata kedua “tawanan”, meskipun ditujukan kepada situasi realita yang dialami para interniran Eropa, seolah memaknai bahwa mereka akan dijadikan sandera untuk memaksa kepentingan politik republik pada sekutu.<sup>79</sup> Analisis ini meskipun agak ekstrim dan tendensius, tetap masuk akal. Bagaimana caranya republik memaksakan merdeka 100% sebelum berunding? Sudah jelas dengan perjuangan bersenjata. Tetapi republik jelas kalah total dalam perbandingan kekuatan militer. Dan satu – satunya cara untuk menahan laju militer sekutu adalah dengan menggunakan sandera asal eropa. Potensi poin nomor lima ini jelas membahayakan hubungan diplomatik republik dan sekutu, setidaknya menurut Anderson.

Usai memaparkan programnya itu, giliran berikutnya untuk berpidato ada pada Jenderal Sudirman. Kehadiran Sudirman dalam sidang ini sebenarnya tidak mengherankan, karena sejatinya baik Presiden, Wakil Presiden maupun para menteri diundang, akan tetapi tidak ada yang hadir, kecuali Sudirman.<sup>80</sup> Meskipun kehadirannya diizinkan oleh Presiden dan Pemerintah, dan meski juga posisinya dianggap sebagai perwakilan pemerintah, nyatanya dalam praktik Sudirman sangat menentang pemerintah.

Sudirman menyuarakan dukungannya pada program Tan Malaka, dan pada saat yang sama juga tetap menyuarakan pandangannya bahwa tentara adalah milik

---

<sup>79</sup> Anderson. *Ibid.*

<sup>80</sup> Anderson. *Ibid.*, h. 323

rakyat dan tidak bergantung pada pemerintah.<sup>81</sup>“Lebih baik diatoom sama sekali daripada merdeka tak 100%”, begitu ucap Sudirman dalam pidatonya. Kata – kata Sudirman dan dukungannya nanti pada PP akan menjadi senjata berbahaya yang diarahkan pada kabinet.

Usai pidato Sudirman, Tan Malaka memberikan pidato penutup. Dalam pidato penutupnya ini, Tan mengumumkan bahwa koalisi yang baru terbentuk ini akan resmi bernama : Persatuan Perjuangan atau disingkat, PP. Kemudian Tan mengumumkan koalisi para tokoh yang tergabung dalam PP, yang akan duduk dalam panitia kecil untuk merumuskan keorganisasian PP. Mereka antara lain, Ibnu Parna dari Pesindo; Wali Al-Fatah, dari Masyumi; Sakirman dari Dewan Perjuangan Jawa Tengah; Abdulmadjid, Partai Sosialis; Jenderal Sudirman, perwakilan TKR; Atmadji, perwakilan TKR Laut; Tan Malaka; Usman, PRI Surabaya; dan Nyonya Mangoenkoesoemo, Perwani.<sup>82</sup>

Pemerintah tak lama segera menyadari gelagat berbahaya dari PP, dan segera melancarkan serangan. Pemerintah melalui BP-KNIP mendesak untuk diadakannya persatuan maksimal yang mendukung pemerintah serta mendiskresitkan organisasi tertentu yang tidak disebutkan namanya, sebagai pengadu domba dan pengacau masyarakat. Pengumuman tersebut juga menyebut berbagai kerelaan pemerintah dalam mendengarkan tuntutan rakyat, diantaranya perpindahan Presiden dan

---

<sup>81</sup>Poeze. *Op. Cit.*, h. 216-217, lebih lengkapnya lihat kutipan nomor 17 dan 18 pada halaman yang sama.

<sup>82</sup> Anderson. *Op. Cit.*, h. 324

Wakilnya dari Jakarta ke Yogyakarta, pendirian Kementerian Agama dan pengangkatan menteri, pelantikan menteri penerangan baru, dan pembentukan Balai Pemuda di Kementerian Sosial yang khusus mengurus keperluan pemuda.<sup>83</sup>

Akan tetapi usaha tersebut tidak bisa membendung perkembangan PP. PKI, BPRI, PBI, dan berbagai partai lainnya telah mengumumkan pada 27 Januari 1946 untuk bergabung dengan PP. Dan lebih berbahayanya lagi, BKPRI yang dikontrol pemerintah via Pesindo menyatakan ikut bergabung dengan PP.<sup>84</sup> Kampanye Tan Malaka bisa dibidang berhasil, jika tidak dikategorikan sukses besar. Sayuti Melik meminta Pemerintah bergabung dengan PP, karena hanya pemerintah yang berdiri sendirian di luar PP, dan PP sendiri tidak bisa bekerja dengan baik menjalankan programnya tanpa pemerintah.

Sjahrir sekarang menghadapi tantangan politik terbesarnya. Mayoritas entitas politik yang sejak dahulu berusaha dia persatukan dibawah kendali pemerintah, justru bersatu di luar pemerintah dan membentuk oposisi raksasa. Dengan komando yang dipegang oleh Tan Malaka dan Jenderal Sudirman yang sangat populer di mata rakyat, pemerintah tidak akan mampu melawan PP.<sup>85</sup> Sekarang, untuk pertama kalinya kabinet dalam bahaya besar.

---

<sup>83</sup> Anderson. *Ibid.*, h. 325

<sup>84</sup> Tidak mengherankan, karena panitia kecil PP sendiri memiliki satu orang perwakilan Partai Sosialis

<sup>85</sup> Tidak satupun tokoh dalam pemerintahan yang mampu menyamai popularitas kedua orang tersebut. Usaha Sjahrir untuk mengisi sebagian besar anggota kabinetnya dengan teknokrat yang ahli tapi tidak populer menjadi bumerang dan blunder besar. Pengecualian tentu diberikan kepada

Kabinet hanya bisa bergantung pada Presiden dan Wakilnya. Namun hal tersebut tidak praktis karena kabinet terpecah dua. Bagian pertama tetap berada bersama Perdana Menteri Sjahrir di Jakarta. Kebanyakan dari bagian ini bertugas di ranah diplomatik. Bagian kedua di bawah komando Amir Sjarifuddin berada di Yogyakarta bersama Presiden dan Wakilnya. Bagian kedua ini berisi semua pejabat kabinet yang bertugas dalam ranah teknis dan operasional, seperti ekonomi, pertahanan, pertanian, sosial, dll.

Yogyakarta jelas memegang kontrol lebih jika dibandingkan dengan Jakarta. Amir segera menjadi tokoh sentral dalam kabinet Yogyakarta.<sup>86</sup> Pada saat yang bersamaan, Sjahrir mulai kehilangan kontrol akan politik nasional. Kesibukannya bernegosiasi dengan sekutu menyita sebagian besar waktunya. Alhasil perpolitikan nasional, dan program kabinetnya menjadi tak terurus. Kabinet mengalami dualisme, yang sedari awal sudah dimanfaatkan oleh PP untuk menekan posisi pemerintah. Kabinet kini tinggal menunggu waktu untuk jatuh.

---

Presiden dan Wakil Presiden, yang meskipun secara nominal memimpin negara, sifatnya hanya seremonial, dan posisi keduanya berada diluar kabinet pemerintah.

<sup>86</sup>Hal ini ditegaskan oleh sebagian besar arsip dan lembar negara (termasuk yang dimiliki penulis) tertanggal 1946-1947 ditandatangani oleh Presiden Soekarno, Menteri Amir Sjarifuddin, dan Sekretaris Negara Pringgodigdo. Sjahrir tidak pernah menandatangani satupun Undang – undang atau keputusan hukum, meskipun menjabat Perdana Menteri.

### **BAB III**

#### **DAMPAK PERKEMBANGAN POLITIK NASIONAL PADA PEMERINTAHAN SUTAN SJAHRIR**

Bab ini berisi tentang narasi dan analisis seputar perkembangan dunia perpolitikan nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kabinet. Sebagai akibat dari perkembangan politik ini, kabinet Sjahrir pertama jatuh, dan Sjahrir harus membangun kabinet kedua dengan dukungan Presiden.

Kabinet kedua ini pun tidak berjalan lama, dan setelah kejatuhannya, Sjahrir diminta membangun kabinet ketiga. Kabinet ketiga berumur sedikit lebih panjang dibandingkan pendahulunya, namun konsesi politik Sjahrir sudah hilang, dan kabinet sendiri hanya memfokuskan tenaganya pada diplomasi dengan Belanda.

#### **A. Kejatuhan Kabinet Pertama**

Menjelang Februari 1946, Persatuan Perjuangan telah memiliki basis yang cukup kuat untuk berdiri dan menantang pemerintah. Meskipun demikian, banyak organisasi yang sebelumnya bergabung untuk memperjuangkan kemerdekaan, mulai

mencium gelagat tidak beres dari organisasi tersebut.<sup>1</sup>Yang dimaksud gelagat tidak beres disini adalah secara perlahan tersingkap bahwa tujuan “merdeka 100%” bukan tujuan utama PP.

PP menolak anggotanya diikutsertakan dalam kabinet selama program minimum merdeka 100% belum disetujui oleh Pemerintahan Sjahrir.Permintaan ini tentu bertentangan dengan keinginan kabinet, meskipun dalam keadaan demikian, kabinet tidak memiliki banyak pilihan terbuka karena begitu masifnya dukungan terhadap PP dari hampir semua elemen masyarakat.Dalam situasi yang sangat membutuhkan dukungan PP tersebut, PP justru menolak mendukung kabinet.<sup>2</sup>

Dengan demikian PP sedang bergerak menuju jalan kehancuran kabinet.PS dan Pesindo yang mulai mencium gelagat tersebut segera keluar dari PP dan berusaha membangun barikade politik untuk kabinet.<sup>3</sup> Sedangkan Masyumi, meskipun tidak keluar dari PP, tetap berusaha bermain aman dengan memerintahkan dua menterinya, Rasjidi dan Natsir untuk tetap bertahan dalam kabinet.

Dengan tekanan yang makin besar, bahaya ikut menjalar menuju Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang untuk sementara waktu bertugas sebagai parlemen.KNIP mendapat tekanan dan serangan yang begitu jelas, sehingga pada

---

<sup>1</sup> George McTurnan Kahin. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok : Komunitas Bambu, h. 248.

<sup>2</sup> Mohammad Hatta. 2011. *Untuk Negeriku Jilid 3 : Menuju Gerbang Kemerdekaan, Sebuah Otobiografi*. Jakarta : Kompas. h. 128-129

<sup>3</sup> Kahin. *Ibid*.

tanggal 31 Januari 1946, melalui sidang parlemen, komposisi kabinet Sjahrir dirombak demi mengakomodir tekanan yang diberikan oleh PP.<sup>4</sup>

Masalah lain yang ikut merebak adalah kemungkinan pelaksanaan pemilu. Keadaan negara yang kacau dan eksistensi sekutu dalam kegiatan sehari – hari di Indonesia membuat pemilu menjadi tidak relevan. Dengan demikian, BP-KNIP merasa gagal akan pemenuhan tugasnya, menyampaikan pengunduran diri pada sidang KNIP tanggal 26 Februari 1946.<sup>5</sup> Pengunduran diri ini ditolak oleh KNIP karena tidak adanya mekanisme yang jelas mengenai statuta atau peraturan penggantian dan tugas kerja BPKNIP. PP membentur tembok politik karena KNIP meskipun kurang representatif dibandingkan PP, tidak bisa dibubarkan.

PP mencoba mencari jalan lain. Kali ini PP menyerang bagian terlemah dari pemerintah secara politik, yaitu kabinet. Tuntutan dialamatkan kepada KNIP untuk membubarkan kabinet Sjahrir. Selain itu, di Yogyakarta, PP mulai melakukan penggalangan aksi massa besar – besaran, yang juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Pada tanggal 26 Februari, Sjahrir tiba di Yogyakarta dan mengajukan pengunduran dirinya pada Presiden Soekarno, desas – desus mulai tersebar bahwa

---

<sup>4</sup>*The Cairns Post*. 13 Februari 1946. "Speedy Negotiations With Dutch", perombakan ini juga untuk mengakomodir tuduhan bahwa kabinet Sjahrir tidak representatif.

<sup>5</sup>Kahin. *Ibid.*, h.249.

perselisihan yang selama ini menjangkiti kabinet antara kubu Sjahrir – Amir disatu sisi dan Tan – Sudirman disisi lain akan segera terselesaikan.<sup>6</sup>

Meskipun sudah mengajukan pengunduran dirinya, Sjahrir masih memiliki kekuatan untuk menyerang balik Tan dan kelompoknya. Seberapa besar pun kekuatan yang berhasil dihimpun Tan, sebagian besar posisi kunci dalam PP tetap dipegang oleh politisi, dan para politisi tersebut masih berharap masuk dalam kabinet Sjahrir. Sementara itu Tan sendiri melarang para politisi untuk bergabung sebelum programnya disetujui. Dari permasalahan ini mulai timbul riak perselisihan dalam pimpinan PP.<sup>7</sup>

Sekali lagi Sjahrir memainkan dengan lihai posisinya untuk sementara waktu. Berlainan dengan Sjahrir yang begitu luwes secara politik, Tan sangat teguh pada pendirian moralnya. Kini makin jelas, Sjahrir akan melepaskan ronde pertama dalam pergulatan dengan PP ini, dan akan menyerang balik pada ronde kedua. Laiknya pertandingan tinju, maka harus ada wasit yang menengahi kedua petarung ini, setidaknya supaya keributan politik di kalangan elit ini tidak berkembang menjadi banjir darah dan perang saudara. Dan posisi yang menguntungkan dan sangat berpengaruh itu jatuh ke tangan Presiden Soekarno, yang seperti diprediksi sebelumnya, mendapatkan kembali pengaruh massanya di Yogyakarta.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Benedict R.O.G. Anderson. 1988. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, h. 341.

<sup>7</sup> Anderson. *Ibid.*, h. 343

<sup>8</sup> Anderson. *Ibid.*, h. 344

Sidang Umum KNIP dibuka di Surakarta pada 28 Februari 1946. Dalam sidang tersebut, sang Presiden mengumumkan bahwa dirinya telah menerima dengan baik pengunduran diri Perdana Menteri Sjahrir dan kabinetnya.<sup>9</sup> Usai pidato Soekarno, Sjahrir naik podium untuk melaporkan kegiatan kabinetnya selama berkuasa, dan pada saat yang sama menekankan bahwa jalan damai dan negosiasi adalah satu – satunya cara yang masuk akal untuk menyelamatkan nyawa republik. Badan Pekerja KNIP kemudian mengumumkan usul pembentukan kabinet baru dan pengambilan suara untuk mengesahkannya. KNIP setuju pembentukan kabinet baru dengan perbandingan suara 140-67-18. Dengan demikian berakhirilah kabinet Sjahrir yang pertama.<sup>10</sup>

Kabinet Sjahrir bisa dikatakan dalam satu dua hal berhasil menjalankan program – programnya, meskipun jelas mayoritas program yang lain gagal dilaksanakan. Secara teori program Sjahrir untuk menyempurnakan pemerintahan daerah, setidaknya di Jawa, berhasil. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota serta desa memiliki organisasi dan unsur pemerintahan. Namun secara praktik, keberadaan pemerintah bentukan Jakarta gagal dimanifestasikan secara lokal dalam berbagai kejadian. Peristiwa tiga daerah yang melibatkan Tegal, Brebes, dan Pemalang serta kurang lebih menggoyang stabilitas residensi Pekalongan adalah contoh bagaimana pemerintah kehilangan otoritas di tingkat lokal dan regional. Contoh lainnya adalah

---

<sup>9</sup>*The Northern Star*. 4 Maret 1946

<sup>10</sup> Anderson. *Op. Cit.* h.. 345

hilangnya kontrol akan wilayah Tangerang ke tangan laskar dan perampok. Dengan sendirinya, karena faktor keamanan dan perang, program lainnya berjatuh.

Ditengah revolusi yang mulai pecah di mana – mana, pemerintahan Sjahrir bergerak luwes secara politik dan meninggalkan program – programnya yang tidak realistis seperti penuntasan masalah mata uang, dan peningkatan kemakmuran warga. Mengenai yang disebut terakhir memang merupakan suatu program yang mendekati mustahil jika melihat kondisi politik yang ada.

Peningkatan kemakmuran dilakukan melalui distribusi makanan pada masyarakat luas. Hal yang bahkan menurut Belanda hampir tidak mungkin dilakukan oleh republik.<sup>11</sup> Kelaparan bisa dibilang makin meyebar seiring kerusuhan dan perampokan tingkat lokal yang makin merajalela. Kesatuan polisi sipil dan militer tidak bisa bertindak banyak terhadap kerusuhan – kerusuhan ini karena selalu disibukkan oleh bentrokan bersenjata dengan sekutu.

Usaha Amir untuk mengontrol tentara yang pengaruh politiknya sudah tertancap dengan teguh di daerah yang mereka kontrol berakhir dengan buruk. Pepolit justru memperkeruh perselisihan antara Amir dan komandan TKR/TRI Jenderal Sudirman. Pada akhirnya perselisihan ini mengarahkan Sudirman pada Persatuan Perjuangan untuk memperjuangkan visinya tentang militer.

---

<sup>11</sup> NEFIS/ARA *Geheim Archief no. 19; Food Situation*

Dengan begitu banyak blunder politik nasional yang dilakukan demi mendapat langkah pada politik internasional, Sjahrir kehilangan posisi dan dukungan politiknya. Pesindo dan Partai Sosialis terlambat menyadari kekeliruan politik langkah mereka yang membuat vonis kejatuhan kabinet menjadi makin jelas. Dan kali ini, giliran Persatuan Perjuangan yang mendapatkan panggung politik.

### **B. Mandat Kedua Sjahrir dan Krisis Maret 1946**

Presiden mengambil alih komando politik usai sidang keputusan BPKNIP, dan meminta kabinet baru segera dibentuk. Dalam persoalan ini, Soekarno condong pada pemimpin sosialis yang berhaluan kiri – tengah yaitu Sjahrir dan Amir. Presiden menginginkan kedua tokoh tersebut kembali memangku jabatan mereka yang semula yaitu Perdana Menteri – Menteri Luar Negeri serta Menteri Pertahanan. Hanya saja Presiden meminta komposisi kementerian yang lain diperluas, dan maksud Presiden dalam hal ini adalah meminta kabinet dibuka untuk pendukung PP.<sup>12</sup>

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, PP bukanlah organisasi ketat yang bersatu dibawah satu tujuan. Meskipun diisi oleh para politisi mapan, serta berada dibawah komando Tan Malaka dan Jenderal Sudirman yang popularitasnya sedang meledak, di dalam PP tetap terjadi perselisihan yang sangat hebat. Permintaan Presiden pada kepemimpinan PP untuk mempersiapkan menteri pilihan mereka

---

<sup>12</sup> Anderson. *Op. Cit.* h. 345-346

membuat benturan terjadi dengan pihak yang tetap teguh menolak permintaan politik apapun sampai syarat minimum yang diajukan Tan Malaka dipenuhi.

Sukarni membawakan surat politik Presiden pada Tan yang menanyakan, apakah Tan mau bergabung dalam kabinet dan menjabat posisi tertentu? Tan tidak mengesampingkan hal tersebut, bahkan cenderung menyetujui permintaan tersebut. Hanya saja dengan syarat, program minimumnya diterima.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Presiden makin lama makin memiliki peranan luar biasa dalam perpolitikan nasional. Sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukannya di Jakarta, selain karena bukan basis politiknya, juga dipengaruhi oleh ancaman militer Belanda setiap hari.

Perundingan antar pendukung PP berlanjut terus, dan makin nampak jelas pula bahwa resolusi Presiden untuk menyelesaikan masalah ini tidak berhasil. Perpecahan mulai terlihat dalam tubuh PP. Presiden menentang minimum program Tan, karena memang tidak realistis, dan ia yakin mayoritas KNIP yang berisi pendukung Sjahrir akan melakukan hal yang sama pada program minimum itu, sehingga pilihan yang tersisa adalah mengembalikan mandat pada Sjahrir yang masih memiliki dukungan politik yang cukup kuat.<sup>14</sup>

KNIP pada tanggal 2 Maret 1946 memutuskan untuk mengangkat Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri. Dan pada sore hari yang sama, Sjahrir mengumumkan program kabinet yang baru, antara lain : pemerintah berunding atas

---

<sup>13</sup> Anderson. *Ibid.* h. 346

<sup>14</sup> Mohammad Hatta. *Op. Cit*

dasar pengakuan republik Indonesia 100%, pemerintah mempersiapkan rakyat dan negara disegala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi, dan sosial, mencapai susunan pemerintahan pusat dan daerah berdasarkan demokrasi, pemerintah berusaha segiat – giatnya untuk menyempurnakan produksi dan pembagian makanan dan pakaian, tentang perusahaan perkebunan yang penting, hendaknya pemerintah mengambil tindakan seperlunya hingga memenuhi maksud sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 mengenai kesejahteraan sosial.<sup>15</sup>

Tanggapan PP akan lima program ini sangat dingin. Poin pertama menjadi perdebatan karena makna yang tidak jelas menyoal dasar yang dimaksud. Apakah yang dimaksud dasar adalah dasar mutlak atautkah sekedar posisi tawar untuk perundingan diplomatik? Poin kedua samar – samar karena tidak memiliki rincian apa yang harus dibuat demi memenuhinya. Poin ketiga dinilai tidak realistis karena pemilu, yang menjadi ruh demokrasi, tidak akan bisa dilaksanakan dalam keadaan revolusi yang serba kacau ini. Poin keempat tidak memiliki masalah karena memang tidak dipersoalkan oleh seorang pun dalam PP, dan poin kelima yang dimaksudkan untuk mengakomodir minimum program, justru mengelak dari minimum program tersebut. Kelima program dengan ini menurut Ben Anderson, justru menolak segala tuntutan PP.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Anderson. *Ibid.* h. 347

<sup>16</sup> Anderson. *Ibid.* h. 348

Sjahrir setuju untuk mencoba melaksanakan apa yang dia sebut sebagai “Lima Pokok Soekarno”,<sup>17</sup> akan tetapi PP melalui Wikana tetap menolak untuk berpartisipasi, bertepatan dengan sikap Tan Malaka, karena tidak satupun tuntutan minimum program dipenuhi secara konkrit.

Permainan politik Presiden Soekarno makin lama makin melemahkan PP dari dalam. Berbagai tawaran politik yang luwes tentu membuat terjadi bentrok kepentingan antara kelompok yang bergabung dengan PP hanya untuk menjatuhkan Sjahrir dan Amir, dengan kelompok Tan Malaka yang berniat untuk merubah seluruh sistem politik. Mengapa presiden mau susah payah untuk ikut campur “merusak” PP dari dalam? Jawabannya adalah karena Presiden merasa terancam prestis politiknya dengan keberadaan Tan Malaka.

Presiden tidak segan – segan mengakui bahwa dari awal dia sudah mencurigai bahwa Sukarni dan kawan – kawan pemudanya di PP berusaha melengserkan dirinya dan mengangkat Tan Malaka sebagai Presiden.<sup>18</sup> Kecurigaan ini logis. Beberapa bulan sebelumnya, Tan memang menawarkan diri pada Sjahrir untuk bekerjasama menggulingkan Soekarno karena dinilai lamban dalam memimpin revolusi, akan tetapi Sjahrir menolak dengan alasan popularitas Soekarno terlalu besar hingga menggulingkannya juga akan berarti mengubur republik yang baru berdiri.

---

<sup>17</sup> Mengisyaratkan kontrol yang dimiliki Presiden atas perpolitikan nasional, dan bahwa Sjahrir sendiri tidak terlibat, dalam ekstensi apapun, dengan perumusan lima pokok tersebut.

<sup>18</sup> Harry A. Poeze. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, Jilid 1 : Agustus 1945- Maret 1946*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. h. 285

Sambil menunggu putusan lebih lanjut mengenai PP dari para pemimpinnya, Hatta tiba di ruang sidang untuk membicarakan soal program minimum. Hatta menolak mayoritas program tersebut, terutama bagian nasionalisasi milik “musuh” yang jelas bertentangan dengan janji yang dia kumandangkan pada 1 November 1945. Hatta berpandangan realis bahwa republik tidak memiliki kekuatan yang memadai dalam usahanya untuk memaksa sekutu memenuhi permintaan nasionalisasi.<sup>19</sup>

Perundingan makin panas antara Soekarno-Hatta yang mewakili pemerintah dengan kelompok PP yang diwakili Sukarni dan Chaerul Saleh. Pada saat yang bersamaan, ditengah kubu Sjahrir juga terjadi perundingan yang alot. Dr. Sudarsono dan Soebadio Sastrosatomo datang pada Sjahrir untuk menawarkan jalan tengah untuk keluar dari krisis politik ini.

Saran dari kedua tokoh tersebut pada Sjahrir adalah, menggulingkan Soekarno.<sup>20</sup> Sebuah saran yang sangat ekstrim namun memiliki alasan – alasan yang logis. Melihat Tan Malaka yang sudah memiliki banyak pendukung, maka menggulingkan Soekarno menjadi pilihan yang cukup aman, dan Sjahrir serta pendukungnya masih bisa berdiri dalam gelanggang politik. Namun Sjahrir menolak, dengan alasan yang cukup tepat. Meski mendapat dukungan mayoritas badan perjuangan, Tan Malaka tidak memiliki basis yang kuat dibanding

---

<sup>19</sup>Poeze. *Ibid.* h. 289

<sup>20</sup>Poeze. *Ibid.* Hal. 290-291

Soekarno. Dukungan pada Tan dalam PP bisa dibidang kebanyakan adalah dukungan kosong yang bisa berubah kapanpun. Alhasil keputusan Sjahrir keluar, tidak ada penggulingan terhadap Presiden.

Dengan prospek politik yang makin kelam untuk PP karena mendapat penolakan dari Presiden dan wakilnya, maka tekanan berdatangan pada partai – partai yang bergabung dalam PP. Pesindo seperti yang sudah ditulis sebelumnya, segera keluar dari PP. Meskipun barikade politiknya terhadap usaha PP menggulingkan kabinet pertama gagal, namun Pesindo kembali hadir membuat barikade politik bagi kabinet kedua yang akan dibentuk. Pesindo mengancam PP untuk tidak mengotak – atik usaha pembentukan kabinet baru, dan kemudian menarik wakilnya Ibnu Parna dari sekretariat PP. Menyusul aksi Pesindo tersebut, Dewan Perjuangan Jawa Timur dan Koperasi Rakyat Indonesia Cirebon ikut menarik diri, meskipun keduanya juga memiliki kursi di sekretariat PP, lantas kedua organisasi tersebut memberikan dukungan penuh pada Sjahrir. Kemudian BTI, PKRI, PIM, Parkindo, Gerindo, Partai Katolik, dan Partai Sosialis menyatakan dukungannya pada Sjahrir untuk membentuk kabinet baru. Masyumi juga menerima tekanan hebat dan terpecah belah, meski akhirnya memutuskan untuk tetap dengan PP.<sup>21</sup>

Maka dengan dukungan yang cukup, pada tanggal 12 Maret 1946 Sjahrir mampu membentuk kabinet koalisi yang baru. Jumlah menteri dalam kabinet ini

---

<sup>21</sup> Anderson. *Op. Cit.* h. 350

menggebu karena berbagai konsesi yang memang harus diberikan Sjahrir demi mengurangi tekanan yang akan dihadapi oleh kabinet barunya

Dengan pembentukan kabinet ini, maka sebenarnya Sjahrir, berusaha memfasilitasi keragaman dan koalisi yang diharapkan Presiden dalam penempatan menteri. Ben Anderson mengatakan kabinet ini masih tidak representatif karena sebagian besar anggotanya adalah simpatisan Sjahrir.<sup>22</sup> Namun harus diakui ini adalah upaya terbaik yang bisa dilakukan Sjahrir karena PP masih memboikot kursi menteri yang menjadi jatahnya.

Masyumi meskipun awalnya teguh mempertahankan prinsip PP untuk tidak bergabung dengan kabinet, akhirnya luluh juga karena ketidakdisiplinan anggota partai, dan sifat mendua para pemimpinnya yang masih mengharapkan kursi di pemerintahan. Prospek mendapatkan dua kementerian, yaitu Kementerian Penerangan dan Kementerian Agama secara penuh tanpa wakil merupakan sebuah godaan politik yang sangat kuat dan akhirnya mempengaruhi Masyumi untuk ikut berpartisipasi dalam kabinet.

PNI juga akhirnya mengirimkan seorang ahlinya Herling Laoh untuk menjadi bagian dari kabinet. Namun perwakilan PBI, Sjamsu Harja Udaja, Samadikun, dan Mohammad Sjafie'i menolak mengisi posisi kabinet mereka. Meskipun demikian, kabinet jalan terus dengan kekuatan yang ada. Presiden memberikan dukungannya,

---

<sup>22</sup> Anderson. *Ibid.* h. 352

dan sekali lagi memerintahkan Sjahrir untuk segera menyiapkan perundingan dengan Belanda.<sup>23</sup>

Satu hari setelah pembentukan kabinet, Sjahrir mengirimkan nota usul balasan kepada Gubernur Jenderal Van Mook mengenai usul pertama menyoyal uni Indonesia – Belanda. Sjahrir mengemukakan bahwa Indonesia siap menerima kepemimpinan Belanda dan bantuan ekonomi, tetapi Sjahrir berpendapat bahwa Indonesia harus diwakili secara keseluruhan dari ujung Sumatera hingga Papua.<sup>24</sup>

Usul ini ditolak oleh Van Mook yang memberikan usul lainnya berupa pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan bentuk federal, karena apapun alasannya, republik tidak memiliki pengaruh lebih di luar pulau Jawa. Sebagai balasan, pada 27 Maret, Sjahrir mengambil sebuah langkah yang sangat beresiko namun cukup penting, meminta pengakuan *de facto* Belanda atas kekuasaan RI di Jawa, Sumatera, dan Madura. Sebagai imbalan Sjahrir menyerahkan konsesi atas Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur, serta Indonesia akan bergabung dalam federasi uni.

Demi melancarkan keputusan politik ini, rupanya antara tanggal 13-16 Maret beredar surat perintah penangkapan terhadap para pimpinan PP. Pemerintah segera bergerak untuk menetralkan barisan pemuda BKPRI yang menjadi salah satu basis pendukung PP. Pesindo menggunakan pengaruhnya untuk mengeluarkan BKPRI dari

---

<sup>23</sup> Anderson. *Ibid.* h. 353

<sup>24</sup> Anderson. *Ibid.* h. 354

PP, dan kemudian dalam Pesindo sendiri terjadi perpecahan. Maka dengan demikian, barisan pemuda kehilangan kontrol, dan dalam waktu singkat, bisa dinetralkan dari pengaruh oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Pada tanggal 16 Maret, Presiden berpidato di Magelang yang berisi peringatan Presiden pada masyarakat untuk mendukung pemerintah berdiplomasi, karena diplomasi adalah salah satu penyangga republik. Pada hari yang sama di kota Madiun, PP mengadakan perumusan program – program yang isinya kurang lebih menuntut kemerdekaan penuh, kerelaan untuk berunding via PBB, dan yang terakhir ancaman menyita harta para pendukung musuh republik di Indonesia.

Sebuah resolusi yang tidak perlu, yang kemudian disusul pula oleh sebuah kegiatan yang sebenarnya sangat tidak perlu untuk dilakukan, pawai dan kongres bersenjata. Berkumpulnya para pemimpin PP dengan ribuan orang bersenjata dalam satu tempat telah memberikan alasan bagi pemerintah untuk meringkus mereka. Usai pawai dan kongres tersebut, pada pukul 4 sore Tan Malaka mendapat kabar bahwa dirinya tidak bisa keluar dari Madiun karena semua jalan menuju kota telah diisolasi oleh Pesindo dan Polisi Militer.<sup>26</sup>

Pada pukul 8 malam, Tan Malaka, Abikusno Tjokrosujoso, Yamin, dan Sukarni ditangkap oleh polisi militer dan dibawa ke Kadipolo, Surakarta melalui pos – pos Pesindo. Di Surakarta mereka bergabung dengan Sayuti Melik yang lebih

---

<sup>25</sup> Anderson. *Ibid.* h. 355-356

<sup>26</sup> Anderson. *Ibid.* h. 358

dahulu ditangkap oleh tentara dibawah pimpinan Mayor Jenderal Djokosoejono, yang merupakan sahabat karib Amir Sjarifuddin, dan seorang penasihat dalam Pesindo.

Para tersangka yang ditangkap oleh pemerintah dengan tuduhan akan melakukan makar ini dipilih dengan cermat. Mereka entah tidak memiliki partai, atau berselisih dengan pimpinan partainya sehingga tidak ada campur tangan dari organisasi apapun yang menentang penangkapan tersebut. Dengan keberhasilan ini, maka pemerintah bebas bergerak untuk mengadakan perundingan dengan Belanda.

Pada tanggal 4 April 1946, delegasi pemerintah RI berangkat ke Belanda bersama Van Mook dan perwakilan Inggris Sir Archibald Clark Kerr untuk menghadiri konferensi di Hooze Veluwe.<sup>27</sup> Tiga hari sebelumnya, Sjahrir menandatangani perjanjian dengan sekutu untuk menghentikan segala gerakan militer di Jawa Tengah dan Timur pasca jatuhnya Bandung ke tangan sekutu. Sebagai gantinya, pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab secara penuh untuk mengurus interniran eropa yang masih tersisa di wilayah republik dan membawa mereka ke garis sekutu.<sup>28</sup>

Sementara itu, konferensi di Hooze Veluwe yang berlangsung sepanjang April – Mei berakhir dengan kegagalan.<sup>29</sup> Baru pada tanggal 17 Juni 1946, setelah begitu lama keheningan politik antar kedua belah pihak, Sjahrir mengirimkan surat rahasia pada Van Mook untuk menganjurkan bahwa sebuah perundingan yang

---

<sup>27</sup> Rudolf Mrazek. 1996. *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. h. 561

<sup>28</sup> Anderson. *Op. Cit.* h. 362

<sup>29</sup> Mrazek. *Op. Cit.* h. 562

sungguh – sungguh dapat dimulai kembali. Akan tetapi surat ini bocor dan isinya diketahui publik. Desas desus beredar bahwa Sjahrir mengurangi tuntutan pada pengakuan *de facto* hanya terhadap Jawa dan Sumatera.<sup>30</sup>

Meskipun jelas terjadi perselisihan antara Soekarno dan Sjahrir mengenai surat tersebut, Hatta mendukung Sjahrir. Namun dukungan itu menjadi blunder politik. Publisitas luas yang muncul akibat dukungan Hatta itu membuat segala hal mengenai surat menyurat rahasia tersebut bocor ke publik. Alhasil, pada tanggal 27 Juni malam, Perdana Menteri Sjahrir dituduh berkhianat pada negara, dan kemudian diculik ke kota Paras, Surakarta. Dengan sendirinya, dalam waktu kurang dari empat bulan, krisis kabinet kedua terjadi.<sup>31</sup>

### **C. Kudeta, Linggarjati, dan Akhir Karier Pemerintahan Sjahrir**

Penculikan Sjahrir pada awalnya dicurigai berasal dari usaha balas dendam kelompok Tan Malaka sebagai akibat penangkapan mereka. Seperti diketahui, siang hari sebelum penculikan, Tan dan seluruh rekannya dibebaskan dari tahanan oleh Mayor Jenderal Sudarsono yang sekarang mengkomandoi Divisi III Tentara Republik

---

<sup>30</sup>Mrazek. *Ibid.* h. 563

<sup>31</sup>Mrazek. *Ibid.* h. 563

Indonesia yang direorganisasi pasca kekalahan mereka di Priangan tiga hari sebelumnya dari pihak sekutu.<sup>32</sup>

Setelah mendengar berita tersebut, Amir yang seperti sebelumnya memimpin bagian kedua dari kabinet, mengadakan rapat darurat bersama para menteri yang ada dan mengusulkan untuk sementara waktu kekuasaan politik harus dialihkan pada Presiden. BPKNIP ikut memberikan pengaturan bahwa tanggung jawab para menteri ditransfer kepada Presiden sampai situasi normal kembali. Keputusan tersebut kemudian diumumkan Soekarno pada tengah malam 28 Juni 1946, negara secara resmi berada dalam keadaan perang.<sup>33</sup>

Tujuan para pelaku kudeta<sup>34</sup> selain untuk menggulingkan Sjahrir juga adalah menggulingkan seluruh pemerintahan, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta didalamnya. Para konspirator terdiri dari Tan Malaka, Ahmad Subardjo, Yamin, Sukarni, Iwa, Sajuti Melik, Dr. Buntaran, dan beberapa perwira militer termasuk Mayor Jenderal Sudarsono. Namun demikian, mereka membutuhkan setidaknya sikap netral Jenderal Sudirman dalam permasalahan ini. Mereka berharap

---

<sup>32</sup>Kahin.*Op. Cit.* h. 266

<sup>33</sup>Kahin.*Ibid.* h. 267

<sup>34</sup> Mengingat aksi para pelaku yang menangkap seorang pejabat aktif pemerintahan tanpa arahan dan perintah Presiden, maka bisa dipastikan tindakan ini bertujuan merebut kekuasaan secara paksa sehingga bisa disebut kudeta, lebih lanjut mengenai definisi kudeta dapat dilihat dalam karya Edward N. Luttwak, *Coup d'Etat : A Practical Handbook*.

posisi Menteri Pertahanan dan Panglima sekaligus cukup menjadi kompensasi bagi sang jenderal agar terlibat dalam konspirasi ini.<sup>35</sup>

Pada 2 Juli 1946, ditemani oleh Yamin, Jenderal Sudarsono menghadap pada Presiden Soekarno. Keduanya mengaku menerima instruksi Jenderal Sudirman untuk meminta Presiden membubarkan kabinet dan menggantinya dengan suatu dewan politik tertinggi, serta pemindahan semua kekuasaan militer Presiden pada Sudirman. Presiden menolak mentah – mentah permintaan tersebut dan memerintahkan para pengawalnya untuk menahan kedua orang tersebut.<sup>36</sup>

Sementara pertemuan itu terjadi, perkembangan terjadi dengan sangat cepat. Jenderal Sudirman dan para petinggi militer lain menolak berpartisipasi pada bentrok ini, dan mengambil posisi netral. Divisi III dan Barisan Banteng sudah melakukan pemberontakan, dan untuk menggulangi hal tersebut, Pesindo bergerak dari Surabaya menuju Jawa Tengah dengan ancaman agar para pemberontak membebaskan Sjahrir, atau Pesindo akan menduduki dan memporak – porandakan Surakarta yang menjadi basis PP.<sup>37</sup>

Selain Pesindo, Divisi Siliwangi pimpinan Kolonel Nasution baru saja kembali datang dari Jawa Barat dan langsung melancarkan aksi pembersihan terhadap

---

<sup>35</sup>Kedekatan Sudirman dengan golongan ekstrimis dari PP ini sudah menjadi tajuk berita dan pengetahuan umum setidaknya mulai dari bulan Februari, yang membuat pemerintah makin mencurigai Sudirman, dan di lain pihak PP berharap atas intervensi Sudirman karena kedekatan pandangan politik. Untuk keterlibatan Sudirman dalam PP, Lihat *The Examiner* edisi 5 Februari 1946 dan *The West Australian* edisi 5 Februari 1946.

<sup>36</sup>Kahin. *Ibid.* h. 268

<sup>37</sup>*The Advocate*. 2 Juli 1946

pemberontak. Divisi III TRI tidak dapat melawan Siliwangi dan Pesindo sendirian, yang akan membuat mereka kehilangan dukungan juga sebagai akibat tuduhan bahwa aksi Divisi III akan membuat Indonesia lemah dihadapan Belanda.<sup>38</sup>

Sudirman agaknya merasakan hal yang sama, dan kemudian menolak mendukung aksi pemberontakan tersebut. Sebagai akibatnya, Divisi III dan Barisan Banteng menyerah. Para tokoh PP ditangkap dan organisasinya dibubarkan. Beberapa perwira Divisi III dan Barisan Banteng ditangkap, termasuk Mayor Jenderal Sudarsono. Diluar orang – orang yang disebut, tidak terjadi pembersihan atau semacamnya. Hal ini terjadi karena pemerintah ingin menghindari terjadinya ketidakseimbangan politik dan akhirnya membuat republik menjadi lemah.

Salah satu hal yang tidak diperkirakan oleh para konspirator terutama adalah loyalitas kepolisian republik. Kepolisian yang masih dipimpin oleh Komisaris Besar Soekanto tidak lagi berada dibawah komando Menteri Dalam Negeri dr. Soedarsono per tanggal 1 Juli 1946.<sup>39</sup> Sehingga meskipun dr. Sudarsono ikut ditangkap bersama Sjahrir, kepolisian sudah berada di tangan presiden. Kesatuan inilah yang mengawal Presiden dan menangkap Jenderal Sudarsono dan Yamin di Istana, salah satu peristiwa yang menjadi kunci gagalnya kudeta.

Sebulan setelah peristiwa ini tidak banyak yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia. Presiden yang masih memegang kendali, memutuskan untuk mengubah

---

<sup>38</sup> Kahin. *Op. Cit.* h. 269

<sup>39</sup> *Himpunan Undang – Undang Negara Republik Indonesia. Penetapan Pemerintah No. 11/S.D. Tahun 1946 tentang Djawatan Kepolisian.* Arsip Nasional Republik Indonesia

representasi golongan dalam pemerintahan dalam sidang KNIP tanggal 10 Juli 1946. Dalam hal persidangan yang sama Menteri Pertahanan mengumumkan kondisi negara kembali netral dan otoritas perdana menteri akan dipulihkan.<sup>40</sup>

Dan setelah restrukturisasi terhadap KNIP, Presiden mengangkat Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri. Meskipun demikian, Sjahrir tidak bisa lagi berkuasa penuh dalam kabinetnya, anggota – anggota kabinet baru merupakan kompromi Presiden dengan beberapa partai dan organisasi politik. Sjahrir terpaksa menerima hal tersebut demi melangsungkan perundingan yang sudah dirancangnya bersama Van Mook.<sup>41</sup>

Keberadaan jumlah menteri yang sangat menggembung menjadi tiga puluh orang ini ditujukan untuk mewakili seluruh golongan di Indonesia. Sebuah usaha yang berhasil, namun dengan kompensasi berupa kontrol yang melemah dari sang perdana menteri. Agaknya Sjahrir tidak begitu memperdulikan komposisi kabinet atau peranannya. Padangannya sekarang fokus pada usaha perundingan dengan Belanda.<sup>42</sup>

Belanda mengirimkan delegasinya yang berada dibawah pimpinan Prof. Willem Schermerhorn untuk memulai perundingan dengan Sjahrir. Schermerhorn yang merupakan ketua Partai Buruh Belanda menjadi wakil golongan progresif di Belanda yang ingin segera menyelesaikan perang di Indonesia. Dengan dukungan dari pihak

---

<sup>40</sup> *Maklumat Presiden No. 2 dan No. 3 tahun 1946*. Arsip Nasional Republik Indonesia

<sup>41</sup> *Kahin. Op. Cit.* h. 272

<sup>42</sup> *Kahin. Ibid.* h. 274 Sjahrir menerima segala usulan yang diajukan oleh Van Mook sebelum kudeta yaitu menyepakati bahwa perundingan akan dibatasi pada status Jawa dan Sumatera. Lihat *Cootamundra Daily Herald* edisi 29 November 1946

Inggris, maka pada 15 November 1946, kedua belah pihak menandatangani perjanjian di kota Linggarjati.<sup>43</sup>

Inti dari perjanjian ini diantaranya adalah pemerintah Belanda mengakui kekuasaan RI secara *de facto* atas Jawa dan Sumatera, pembentukan negara federal demokratis di wilayah di luar RI, pembentukan Uni Indonesia – Belanda, serta pengurangan kekuatan pasukan diantara kedua belah pihak.<sup>44</sup>

Pada tahun berikutnya, tepatnya tanggal 24 Maret 1947, Sjahrir tiba kembali di Jakarta usai menghabiskan tiga bulan di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan para politikus dan Presiden perihal Perjanjian Linggarjati. Keesokan harinya pada tanggal 25 Maret, Sjahrir, Schermerhorn, dan Van Mook ikut menandatangani perjanjian tersebut.<sup>45</sup>

Usai menandatangani perjanjian tersebut, Sjahrir pada awal April 1947 bertolak ke India dalam rangka menuntaskan janjinya pada India untuk memberi bantuan sebanyak 500.000 ton beras kepada rakyat India yang sedang dilanda kelaparan. Setibanya di Delhi, Sjahrir hadir dalam rangkaian akhir konferensi Asia dimana kontingen Indonesia dipimpin oleh Agus Salim.<sup>46</sup>

Sekembalinya ke Indonesia, Sjahrir mendapati kaum nasionalis menentang perjanjian yang ia tandatangani. Pada tanggal 27 Mei 1947, ultimatum Belanda hadir

---

<sup>43</sup>Kahin.*Ibid.*

<sup>44</sup>Kahin.*Ibid.* h. 275

<sup>45</sup>Mrazek.*Op. Cit.* h. 589 ;*The Mercury*. 24 Maret 1947

<sup>46</sup>Mrazek.*Ibid.* h. 594

untuk memaksa pemerintah Indonesia menerima wewenang Belanda melalui masa peralihan, hingga akhirnya kedaulatan republik diserahkan.<sup>47</sup>

Pada tanggal 20 Juni 1947, Sjahrir mengirimkan memorandum kepada delegasi Belanda bahwa dia sepakat akan tuntutan ultimatum Belanda dan kemudian mengutus Abdulmadjid ke Yogyakarta untuk berkompromi perihal ultimatum tersebut. Namun pengiriman Abdulmadjid tersebut berujung fatal.

Ketika pada tanggal 25 Juni Sjahrir mengunjungi Yogyakarta, Abdulmadjid bukannya berkompromi sebagaimana diperintahkan oleh Sjahri, justru malah menyerang putusannya. Sjahri mendapati Tan Ling Djie, Wikana, dan bahkan Amir bergerak melawannya karena keputusan perjanjian Linggarjati itu. Pada 26 Juni Sjahrir berusaha mendapatkan dukungan dari sayap kiri Partai Sosialis. Namun dengan tuntutan yang makin banyak akan pengunduran dirinya, Sjahrir akhirnya mengajukan pengunduran dirinya pada Presiden Soekarno. Pada tanggal 27 Juni 1947, Presiden secara resmi menerima pengunduran diri Sjahrir, maka selesailah karir politik Sjahrir sebagai pejabat pemerintahan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mrazek.*Ibid.* h. 609

<sup>48</sup> Mrazek.*Ibid.* h. 614

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Pemerintahan Sutan Sjahrir yang berlangsung secara berkesinambungan antara 1945-1947 menjadi kunci masa depan rakyat Indonesia. Sjahrir bersama kabinet – kabinetnya bisa dibilang meletakkan fondasi dasar negara dalam percaturan politik Internasional. Semasa kabinetnya pun pembangunan organisasi pemerintahan diluncurkan. Hanya saja pelaksanaan program politik nasional yang digagas Sjahrir tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan.

Jalan pemerintahan Sjahrir merupakan suatu dinamika yang unik. Pada suatu waktu Sjahrir berada pada puncak pengaruh usai mengeluarkan pamflet Perjuangan Kita yang menyerang para pemimpin Indonesia yang menjadi bagian dari kelompok kolaborator yang bekerja pada Jepang. Dengan memanfaatkan kekecewaan Pemuda kepada lambannya respons pemerintahan Sukarno atas tuntutan merdeka yang mulai muncul di seantero Indonesia, Sjahrir berhasil memaksa pembentukan partai politik yang akhirnya menjadi kendaraan politiknya menuju kursi Perdana Menteri.

Naiknya Sjahrir ini juga menjadi bagian dari kompromi politik untuk menghindari tuduhan dari pihak Belanda dan Inggris bahwa Indonesia merupakan negara boneka fasis bentukan Jepang, karena Sjahrir sendiri tidak pernah terlibat

dalam usaha kolaborasi dengan kedua negara tersebut selama menjajah Indonesia. Pengakuan dari pihak Inggris makin menaikkan prestise Sjahrir di mata politikus dan pemuda Indonesia serta mengecilkan peranan Presiden Sukarno yang terus dibayangi tuduhan penjahat perang karena masa lalunya sebagai kolaborator Jepang.

Semenjak menjadi Perdana Menteri, Sjahrir terlibat secara penuh dalam negosiasi dengan Inggris dan Belanda mengenai status Indonesia, sehingga program politik kabinetnya sedikit banyak terbengkalai dan dalam beberapa kasus, Sjahrir memberikan kebebasan pada para menterinya untuk mengurus sendiri bidang kementerian mereka. Salah satunya adalah Amir Sjarifuddin yang menjabat Menteri Pertahanan.

Amir yang memiliki kebebasan dalam mengurus formasi tentara republik berusaha memasukkan sistem ala Soviet ke dalam staf umum dan organisasi lapangan dari TKR. Tindakan tersebut membuat Amir bentrok dengan Panglima Sudirman dan seluruh staf umum militer. Meski profesionalisme tentara yang digalang Sjahrir mendapat dukungan dari mantan tentara yang dididik oleh KNIL dan Akademi St. Cyr milik Angkatan Darat Belanda, namun sistem Amir dinilai oleh para petinggi militer dan kelompok oposisi terlalu ekstrim dan justru akan membuat tentara tidak profesional karena berubah menjadi tentara politik.

Semenjak bentrok politik dengan militer ini, prestise serta kredibilitas Sjahrir dan kabinetnya menurun. Kelompok oposisi memanfaatkan tentara sebagai pion

dalam usaha mereka menyerang pemerintahan Sjahrir. Usaha ini berhasil setelah Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka dengan dukungan Jenderal Sudirman memaksa pengunduran diri Sjahrir dari pemerintahan.

Dampak dari peristiwa tersebut semakin jelas. Sjahrir dan kabinetnya kini bergantung pada tawar menawar politik yang dilakukan oleh Presiden. Meskipun memiliki kekuatan yang cukup besar, kebanyakan politisi yang terlibat dalam PP menolak mengangkat Tan Malaka sebagai Perdana Menteri dan mendukung Presiden untuk kembali mengangkat Sjahrir untuk kedua kalinya menjadi Perdana Menteri.

Kabinet kedua ini sudah merencanakan negosiasi dengan pihak Belanda sebelum akhirnya pada 3 Juli 1946, Persatuan Perjuangan melancarkan kudeta terhadap Sjahrir dan Presiden. Kudeta tersebut gagal, namun Sjahrir sudah tidak lagi memiliki pengaruh politik yang cukup untuk menegosiasikan posisi politiknya di dunia perpolitikan nasional.

Alhasil pembentukan kabinet ketiga sepenuhnya berada di luar kendali Sjahrir, dan Presiden meminta Sjahrir untuk berkonsentrasi terhadap usaha negosiasi dengan Belanda. Hasil negosiasi tersebut adalah Perjanjian Linggarjati.

Sjahrir dan kabinetnya naik turun dalam hal pengaruh politik dalam perjalanan sejarahnya. Dalam satu waktu Sjahrir merupakan orang paling berkuasa dengan begitu banyak pendukung di belakangnya, namun konflik dengan militer membuat Sjahrir dan kabinet serta para pendukungnya kehilangan posisi berdiri

dalam dunia perpolitikan nasional. Sjahrir jatuh sama cepatnya dengan dirinya berkuasa. Pada akhirnya, hampir semua pendukungnya meninggalkannya, termasuk Amir Sjarifuddin, menteri kepercayaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip :

NEFIS/ARA.*Geheim Archief no. 19; 1945*. Arsip Nasional Republik Indonesia

Sekretariat Negara Republik Indonesia.*AD/ART Pesindo : Daftar Pengurus*. Arsip Nasional Republik Indonesia

Himpunan Undang – Undang Negara Republik Indonesia.*Penetapan Pemerintah No.11/S.D Tahun 1946 Perihal Djawatan Kepolisian*. Arsip Nasional Republik Indonesia

Himpunan Undang – Undang Negara Republik Indonesia.*Maklumat Presiden No.2 dan No.3 Tahun 1946*. Arsip Nasional Republik Indonesia

### Surat KabarDigital :

The Examiner, 5 Februari 1946

The Examiner, 29 Maret 1946

The Mercury, 24 Maret 1947

The Advocate, 2 Juli 1946

The Daily Mercury, 15 Maret 1946

The Daily Mercury, 5 September 1946

The Northern Star, 4 Maret 1946

The Northern Star, 28 Desember 1945

Cootamundra Daily Herald, 29 November 1946

The West Australian, 5 Februari 1946

The Cairns Post, 13 Februari 1946

### Buku – Buku :

- Abdullah, T., & Surjomihardjo, A. *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Jakarta: Gramedia.(1985)
- Adams, C. *Sukarno : An Autobiography, As Told to Cindy Adams*. New York: The Bobbs - Merrill Company Inc.(1965)
- Anderson, B. *Revolusi Pemoeda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa : 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.(1988)
- Anwar, R. *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia.(1980)
- Anwar, R. *Sejarah Kecil : Petite Histoire Indonesia Jilid 7*. Jakarta: Kompas.(2015)
- Anwar, R. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta: Kompas.(2010)
- Az., Lukman. S. *Sutan Sjahrir*. Yogyakarta: Palapa.(2014)
- Cribb, R. *Gangster and Revolutionaries : The Jakarta People and The Indonesian Revolution 1945-1949*. Singapore: Equinox Publishing.(2009)
- Djamin, A. *Jenderal Polisi Soekanto Tjokrodiatmodjo*. Jakarta: Kompas.(2016)
- Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah (terj. Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: UI-Press.
- Hatta, Mohammad. *Untuk Negeriku Jilid 3 : Menuju Gerbang Kemerdekaan, Sebuah Otobiografi*. Jakarta : Kompas (2011)
- Kahin, G. M. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.(2013)
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.(1995)
- Legge, J.D. *Intellectuals and Nationalism in Indonesia : Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupied Jakarta*. Singapore : Equinox Publishing (2010)
- Luttwak, E. N. *Coup d'Etat : A Practical Handbook*. New York: Alfred Knopf, Inc.(1969)
- Mrazek, R. *Sjahrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.(1996)
- Muljana, S. *Kesadaran Nasional : Dari Kolonialisme Hingga Kemerdekaan, Jilid II*. Yogyakarta: LKIS.(2008)
- Poeze, H. A. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia : Jilid 1, Agustus 1945-Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.(2008)
- Pusponegoro, M. D. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.(2008)

- Sastrosatomo, S. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.(1987)
- Sjahrir, S. *Perdjoeangan Kita*. Jakarta: Anjing Galak Penerbitan. (2010)
- Sjahrir, S. *Renungan dan Perjuangan*. Jakarta: Djambatan.(1990)
- Soelias, N. J. *Pesindo : Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950*.Kota Tangerang Selatan :  
Marjin Kiri.(2016)
- Tim Tempo. *Sjahrir : Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: Tempo & KPG.(2010)

## Lampiran 1



Gambar 1 : Sutan Sjahrir Muda

Sutan Sjahrir Muda ketika masih bersekolah hukum di Leiden

Sumber : <https://www.zenius.net/blog/11441/biografi-sutan-syahrir>

Diunduh pada 27 Juli 2017, pkl. 15.10 WIB

## Lampiran 2



Gambar 2 : Sutan Sjahrir (kiri) bersama Presiden Soekarno (tengah), dan Wapres Mohammad Hatta (kanan)

Ket : Sutan Sjahrir, Soekarno, dan Hatta adalah tiga orang yang secara politik memiliki kedudukan tertinggi di Republik Indonesia pada awal masa kemerdekaan.

Sumber : [http://www.kompasiana.com/kimi\\_raikko78/sutan-sjahrir-bung-kecil-berjasa-besar\\_551704a98133116d52bc733a](http://www.kompasiana.com/kimi_raikko78/sutan-sjahrir-bung-kecil-berjasa-besar_551704a98133116d52bc733a)

Diunduh pada 28 Juli 2017, pkl. 09.45 WIB

### Lampiran 3



Gambar 3 : Amir Sjarifuddin (kiri) dan Sutan Sjahrir (kanan)

Ket : Amir Sjarifuddin bertugas sebagai Menteri Pertahanan pada ketiga kabinet Sjahrir. Keduanya merupakan pemimpin dari Partai Sosialis dan memiliki pengaruh politik cukup kuat di dalam dan di luar kabinet.

Sumber : <http://historia.id/modern/kongsi-kaum-soskasoski>

Diunduh pada 26 Juli 2017, pkl. 17.45 WIB

#### Lampiran 4



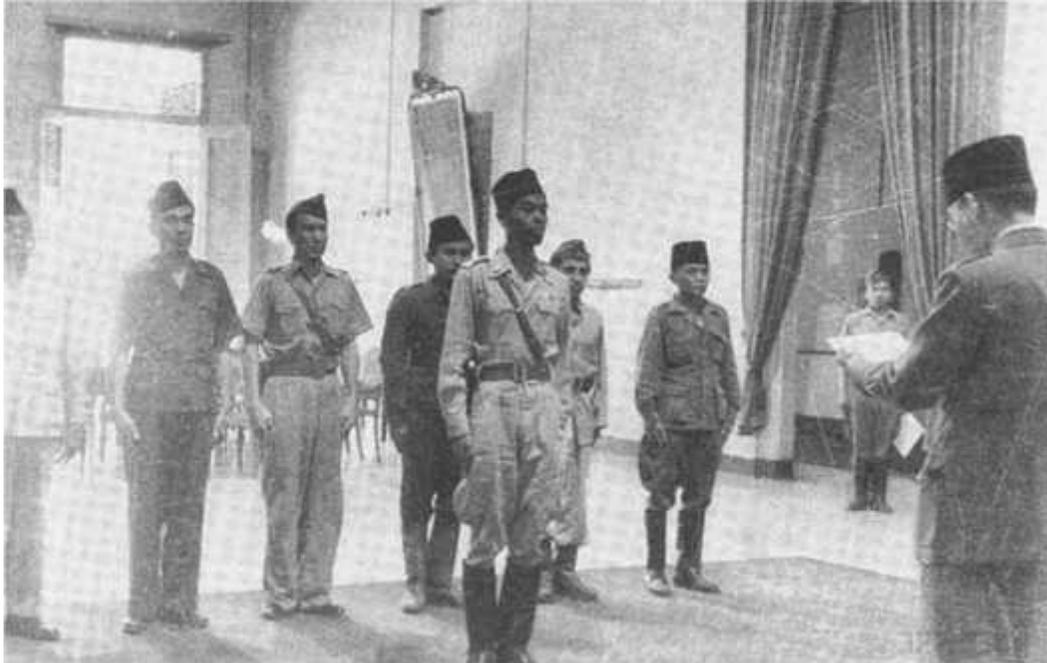
Gambar 4 : Perdana Menteri Sjahrir (kiri) dan Panglima Jenderal Sudirman (kanan) di Jakarta

Ket : Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Jenderal Sudirman kerap kali berseteru secara politik karena permasalahan struktur dan doktrin angkatan bersenjata. Perseteruan antara keduanya dimanfaatkan oleh lawan politik Sjahrir dan berujung pada berhentinya ketiga kabinet Sjahrir.

Sumber : <http://edisikusustempo.blogspot.co.id/2009/>

Diunduh pada 25 Juli 2017, pkl. 20.15 WIB

## Lampiran 5



Gambar 5 : Pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima TKR

Ket : Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V TKR Banyumas memenangkan pemilihan internal dalam Staf Umum TKR untuk menjadi Panglima. Kemenangan Sudirman ini juga berarti kekalahan fraksi KNIL pada fraksi PETA dalam Staf Umum yang dipimpin oleh Oerip Soemohardjo dan berakhir dengan konflik politik dengan kabinet Sjahrir yang anti Jepang.

Sumber : <http://serbaserbidodo.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-tentara-nasional-indonesia.html>

Diunduh pada 10 Mei 2017, pkl. 18.22 WIB

## Lampiran 6



Gambar 6 : Sutan Sjahrir diapit oleh Jenderal Christison (kiri) dan Humbertus Van Mook (kanan)

Ket : Sutan Sjahrir dikenal dengan julukan “Bung Kecil” yang berasal dari foto dimana kedua orang yang mengapit Sjahrir adalah orang yang bertubuh tinggi. Kedua orang tersebut adalah Komandan tentara Inggris di Hindia, Letjen. Sir Philip Christison dan Letnan Gubernur Hindia Belanda, H. J. Van Mook yang berfoto bersama usai pertemuan pendahuluan yang mengakui secara de facto pemerintahan Sjahrir.

Sumber : <http://edisikhusustempo.blogspot.co.id/2013/09/tak-ada-patung-bung-kecil.html>

Diunduh pada 12 Mei 2017, pkl. 09.45 WIB

### Lampiran 7



Gambar 7 : Prof. Schermerhorn (kiri, wakil Belanda) berjabat tangan dengan Sjahrir (kanan) disaksikan oleh Lord Killearn (tengah, wakil Inggris), usai menandatangani Perjanjian Linggarjati

Ket : Perjanjian Linggarjati adalah puncak kegiatan politik Kabinet Sjahrir. Belanda bersedia mengakui secara de facto kekuasaan Indonesia atas Jawa dan Sumatera. Sukses perjanjian ini diantaranya disebabkan oleh dorongan pihak sosialis liberal di Belanda yang diwakili oleh Prof. Schermerhorn yang memiliki pandangan politik yang sama dengan Sjahrir

Sumber : <http://suastawanpande.blogspot.co.id/2013/09/perjanjian-linggarjati.html>

Diunduh pada 12 Mei 2017, pkl. 09.12 WIB

## Lampiran 8



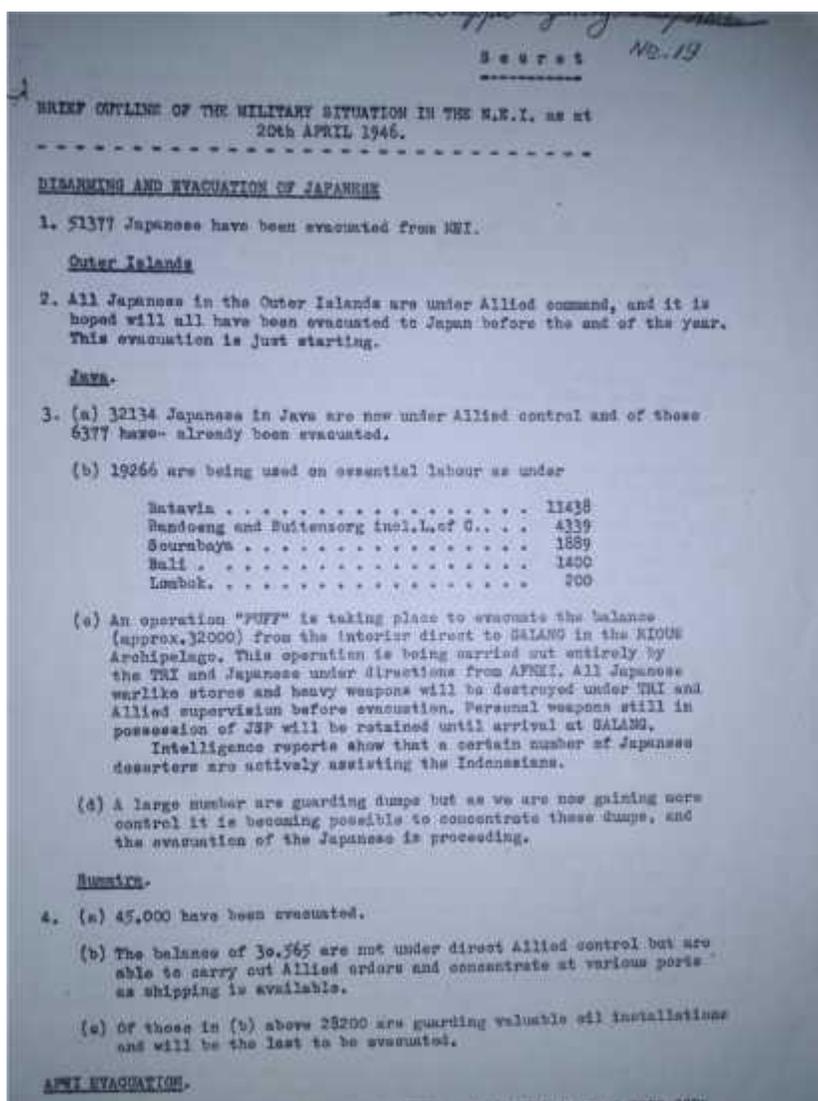
Gambar 8 : Tan Malaka, Pemimpin Persatuan Perjuangan

Ket : Tan Malaka meskipun muncul agak terlambat dalam perpolitikan nasional pasca proklamasi, namun dalam waktu singkat berhasil menguasai panggung politik nasional dengan kendaraan politiknya “Persatuan Perjuangan”. Tan terbukti sebagai lawan politik terberat Sjahrir selama berkuasa menjadi Perdana Menteri.

Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Tan\\_Malaka](https://id.wikipedia.org/wiki/Tan_Malaka)

Diunduh pada 6 Juli 2017, pkl. 16.50 WIB

## Lampiran 9

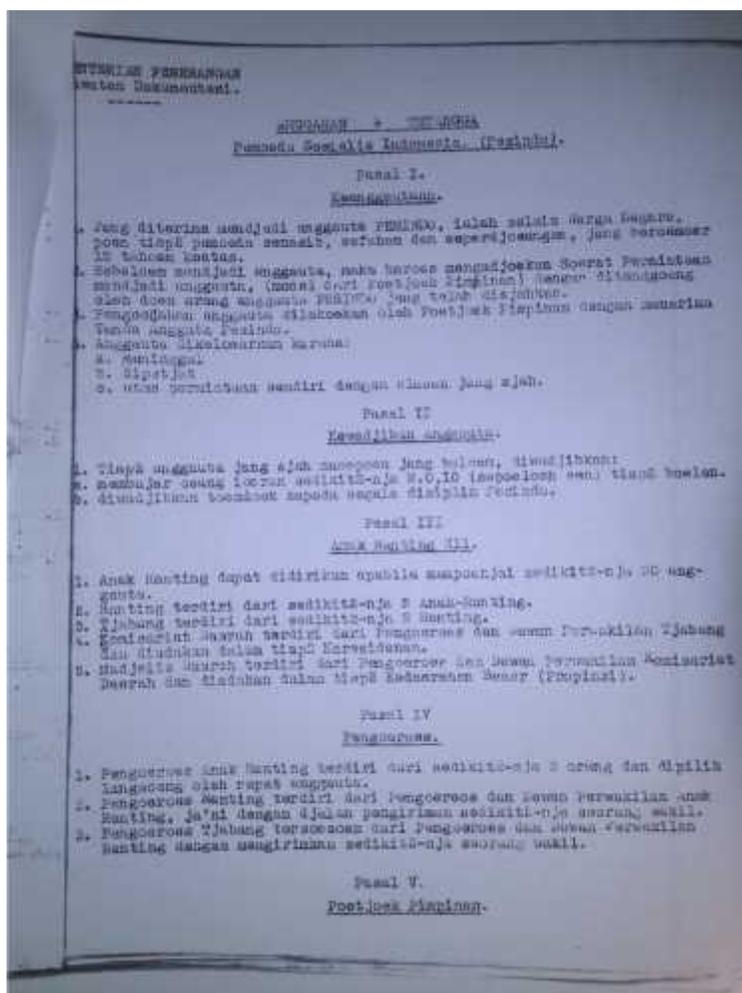


Gambar 9: Geheim Archief No.19

Ket: Geheim Archief No.19 berisi tentang laporan intelijen militer Sekutu tentang kondisi sehari-hari di Pulau Jawa yang meliputi keadaan masyarakat sipil, ketersediaan bahan pangan dan kondisi kesatuan militer Republik Indonesia.

Sumber : Katalog Nefis ARA – Arsip Nasional Republik Indonesia.

## Lampiran 10

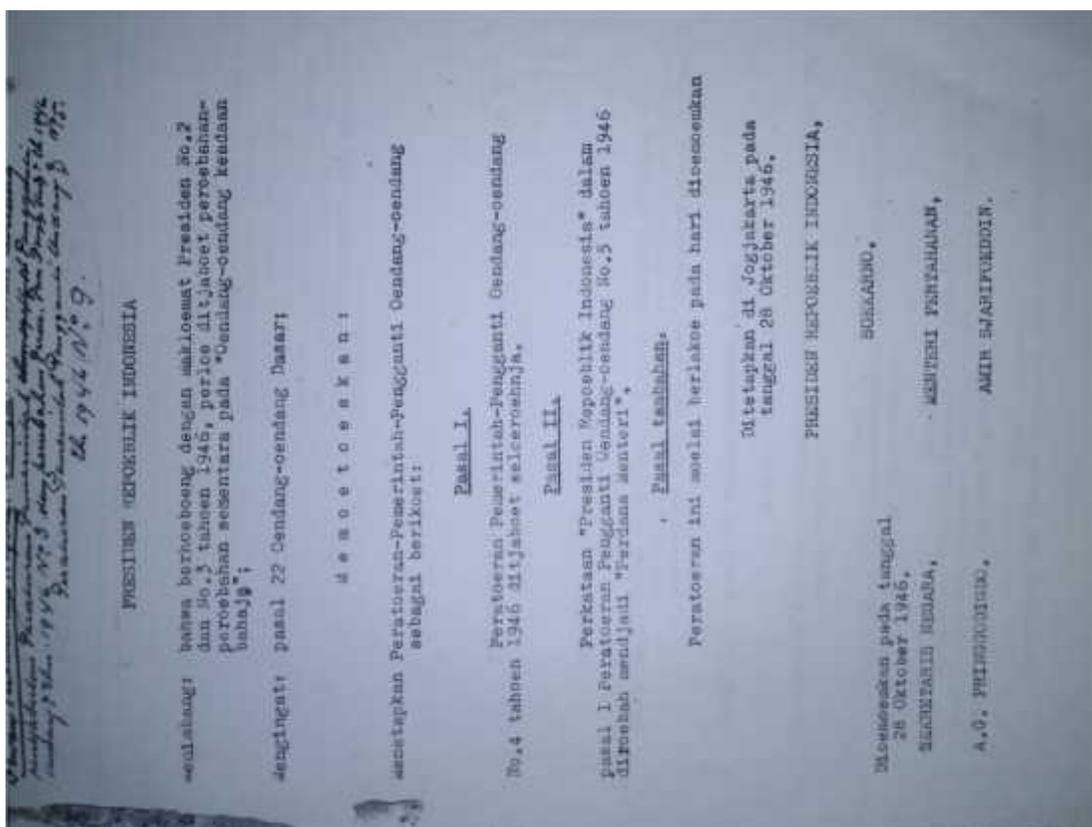


Gambar 10: AD-ART Pesindo.

Ket: Arsip ini berisi struktur organisasi dan tata cara organisasi yang berlaku di dalam Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).

Sumber: Katalog Kementerian Penerangan Indonesia- Arsip Nasional Republik Indonesia.

## Lampiran 11



Gambar 11: Perpu No. 2 dan No. 3, tahun 1945

Ket: Perpu No.2 dan No.3 berisi tentang pembatalan Undang-Undang Darurat Militer yang diterapkan oleh Presiden pasca penculikan Sutan Sjahrir.

Sumber: Katalog Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia – Arsip Nasional Republik Indonesia.

Lampiran 12



Gambar 12: The Mercury, 24 Maret 1947 “Indonesia to Signs Dutch Agreement”

Ket: Dalam berita ini dilampirkan bahwa Pemerintahan Sjahrir dan Van Mook bersedia untuk melakukan perundingan gencatan senjata.

Sumber :

<http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/26381477?searchTerm=linggadjati&searchLimits=#>  
 diunduh pada 17 Juli 2017.

## Lampiran 13



Gambar 13: The Examiner, 5 Februari 1946 “ Test for Sjahrir Govt.”

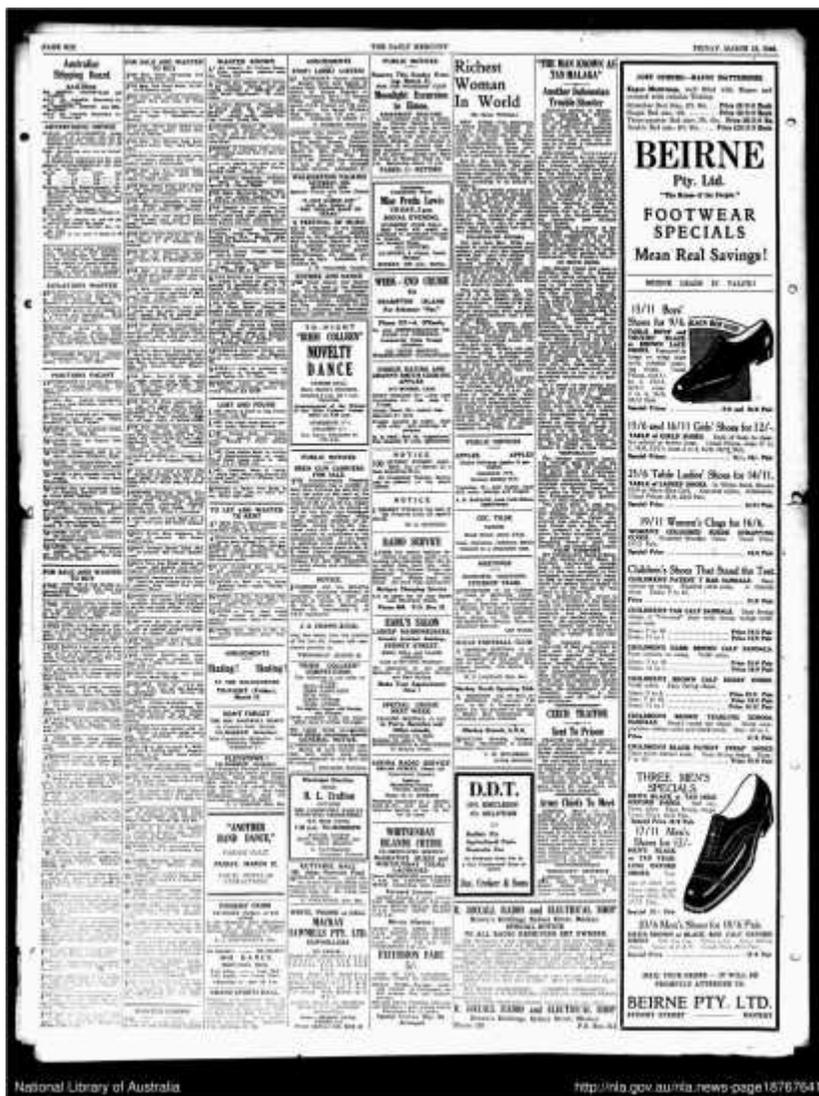
Ket: Dalam berita diatas Kabinet Sjahrir menghadapi tantangan politik besar pertamanya yaitu permintaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh KNIP atas desakan dari Persatuan Perjuangan.

Sumber :

<http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/92689463?searchTerm=sjahrir&searchLimits=dateFrom=1946-01-01|||dateTo=1946-12-31#>

Diunduh pada 17 Juli 2017

Lampiran 14



Gambar 14 : The Daily Mercury, 15 Maret 1946, “The Man known as Tan Malaka”

Ket : Berita ini berisi rumor tentang Tan Malaka dan legendanya yang tersebar di Jawa  
 Sumber :

<http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/171137535?searchTerm=tan%20malaka&searchLimits=dateFrom=1946-01-01||dateTo=1946-12-31#>

Diunduh : 17 Juli 2017

## Lampiran 15



Gambar 15 : The Examiner, 29 Maret 1946, “Extrimist Purge by Sjahrir”

Ket : Berita ini berisi aksi pembersihan politik yang dilancarkan Sjahrir kepada anggota Persatuan Perjuangan

Sumber :

<http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/92699914?searchTerm=sjahrir&searchLimits=dateFrom=1946-01-01||dateTo=1946-12-31#>

Diunduh pada : 18 Juli 2017

## Lampiran 16



Gambar 16 : The Advocate, 2 Juli 1946, "Sjahrir Released!"

Ket : Sutan Sjahrir dibebaskan dari kelompok Kudeta 3 Juli 1946 (Waktu penerbitan koran memakai waktu pasifik sehingga terlambat satu hari)

Sumber :

<http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/69045252?searchTerm=sjahrir&searchLimits=dateFrom=1946-01-01|||dateTo=1946-12-31#>

Diunduh pada : 18 Juli 2017

## Lampiran 17



Gambar 17 : The Northern Star, 4 Maret 1946, "Sjahrir Resigns"

Ket : Berita ini mengumumkan pengunduran diri Sjahrir dari posisi Perdana Menteri sehari sebelumnya.

Sumber :

<http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/99016634?searchTerm=sjahrir&searchLimits=dateFrom=1946-01-01||dateTo=1946-12-31#>

Diunduh pada 20 Juli 2017

## Lampiran 18



Gambar 18 : The Northern Star, 28 Desember 1945, "Narrow Escape for Sjahrir"

Ket : Sutan Sjahrir selamat dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit NICA.

Sumber :

<http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/99174469?searchTerm=sjahrir%20escape&searchLimits=#>

Diunduh pada 21 Juli 2017

Lampiran 19



Cootamundra Daily Herald, 29 November 1946, “Declarations by Sjahrir”

Ket : Deklarasi Sjahrir akan usaha – usaha diplomatik lebih lanjut yang akan dilakukan dengan Belanda

Sumber :

<http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/143771886?searchTerm=sjahrir&searchLimits=dateFrom=1946-01-01||dateTo=1946-12-31#>

Diunduh pada 25 Juli 2017

## Lampiran 20

### DAFTAR MENTERI KABINET SJAHIR

Kabinet Sjahrir yang Pertama (14 November 1945 – 12 Maret 1946)

POSISI	MENTERI	PARTAI
Perdana Menteri	Sutan Sjahrir	Partai Sosialis
Menteri Luar Negeri	Sutan Sjahrir	Partai Sosialis
Menteri Dalam Negeri	Sutan Sjahrir	Partai Sosialis
Menteri Keamanan Rakyat	Amir Sjarifuddin	Partai Sosialis
Menteri Penerangan	Amir Sjarifuddin	Partai Sosialis
Menteri Kehakiman	Soewandi	Non - Partai
Menteri Keuangan	Sunarjo Kolopaking	Non – Partai
Menteri Kemakmuran	Darmawan Mangunkusumo	Non – Partai
Menteri Perhubungan	Abdul Karim	Non – Partai
Menteri Sosial	Sudarsono	Partai Sosialis
Menteri Pengajaran	T.S.G. Mulia	Parkindo
Menteri Kesehatan	Darmasetiawan	Non – Partai
Menteri Negara Urusan Agama	H Rasjidi	Masyumi

Sumber : Benedict R.O.G. Anderson, *Revoloesi Pemoeda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan (1988)

## Lampiran 21

Kabinet Sjahrir yang Kedua (13 Maret – 2 Oktober 1946)

POSISI	MENTERI	PARTAI
Perdana Menteri	Sutan Sjahrir	Partai Sosialis
Menteri Luar Negeri	Sutan Sjahrir	Partai Sosialis
Menteri Muda Luar Negeri	H Agus Salim	Non – Partai
Menteri Dalam Negeri	Sudarsono	Partai Sosialis
Menteri Muda Dalam Negeri	R. Samadikun	Non – Partai
Menteri Kesehatan	Darmasetiawan	Non – Partai
Menteri Muda Kesehatan	Johannes Leimena	Parkindo
Menteri Keuangan	R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo	Non – Partai
Menteri Muda Keuangan	R. Sjafruddin Prawiranegara	Masyumi
Menteri Perdagangan	Darmawan Mangunkusumo	Non – Partai
Menteri Muda Perdagangan	Sjamsu Harja Udaja	PBI
Menteri Pertanian	Baginda Zainuddin Rasad	Non – Partai
Menteri Muda Pertanian	R. Saksono Prawirohardjo	Non – Partai
Menteri Pertahanan	Amir Sjarifuddin	Partai Sosialis
Menteri Muda Pertahanan	Arudji Kartawinata	Masyumi
Menteri Kehakiman	Soewandi	Non – Partai
Menteri Muda Kehakiman	R. Hadi	Non – Partai
Menteri Pengajaran	Mohammad Sjaf'e'i	Non – Partai
Menteri Muda Pengajaran	T.S.G. Mulia	Parkindo
Menteri Penerangan	Mohammad Natsir	Masyumi
Menteri Sosial	R.A. Maria Ulfah Santoso	Non – Partai
Menteri Muda Sosial	Abdulmadjid Djodjodiningrat	Partai Sosialis
Menteri Agama	H Rasjidi	Masyumi
Menteri Perhubungan	Abdul Karim	Non – Partai
Menteri Muda Perhubungan	R. Djuanda	Non – Partai
Menteri Pekerjaan Umum	Putuhena	Parkindo
Menteri Muda Pekerjaan Umum	Herling Laoh	PNI
Menteri Negara Urusan Pemuda	Wikana	BKPRI

Sumber : Sumber : Benedict R.O.G. Anderson, *Revoloesi Pemoeda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan (1988) h. 351

## Lampiran 22

Kabinet Sjahrir yang Ketiga (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947)

POSISI	MENTERI	PARTAI
Perdana Menteri	Sutan Sjahrir	Partai Sosialis
Menteri Luar Negeri	Sutan Sjahrir	Partai Sosialis
Wakil Menteri Luar Negeri	H Agus Salim	Non – Partai
Menteri Dalam Negeri	Muhammad Roem	Masyumi
Wakil Menteri Dalam Negeri	Wijono	Partai Sosialis
Menteri Kehakiman	Susanto Tirtoprodjo	PNI
Wakil Menteri Kehakiman	R. Hadi	Non – Partai
Menteri Keuangan	Sjafruddin Prawiranegara	Masyumi
Wakil Menteri Keuangan	Lukman Hakim	PNI
Menteri Kemakmuran	A.K. Gani	PNI
Wakil Menteri Kemakmuran	Jusuf Wibisono	Masyumi
Menteri Kesehatan	Darmasetiawan	Non – Partai
Wakil Menteri Kesehatan	Johannes Leimena	Parkindo
Menteri Pendidikan	Soewandi	Non – Partai
Wakil Menteri Pendidikan	Gunarso	Non – Partai
Menteri Sosial	R.A. Maria Ulfah Santoso	Partai Sosialis
Wakil Menteri Sosial	Abdulmadjid Djodjoningrat	Partai Sosialis
Menteri Agama	Faturrachman	Masyumi
Menteri Pertahanan	Amir Sjarifuddin	Partai Sosialis
Wakil Menteri Pertahanan	Harsono Tjokroaminoto	Masyumi
Menteri Penerangan	Mohammad Natsir	Masyumi

Wakil Menteri Penerangan	A.R. Baswedan	Komunitas Arab
Menteri Perhubungan	R. Djuanda	Non – Partai
Wakil Menteri Perhubungan	Setiadjit	PBI
Menteri Pekerjaan Umum	Putuhena	Parkindo
Wakil Menteri Pekerjaan Umum	Herling Laoh	PNI
Menteri Negara	Sultan Hamengku Buwono IX	Sultan Yogyakarta
Menteri Negara	Wachid Hasjim	PKI
Menteri Negara	Wikana	Partai Sosialis
Menteri Negara	Tan Pao Gwan	Komunitas Tionghoa
Menteri Negara	Danudirja Setiabbudhi	Komunitas Indo-Eropa

Sumber : George McTurnan – Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*,

Depok : Komunitas Bambu (2013), h. 273-274

## RIWAYAT HIDUP



Giovanironi Jeremy, lahir di Jakarta 16 April 1994  
Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan suami  
istri Robinson Ginting dan Nilawati. Bertempat tinggal  
di Jalan Rambutan No. 13c, Rt 014/01, Jagakarsa,  
Jakarta Selatan.

Penulis menamatkan pendidikan di Taman Kanak-kanak  
PSKD Kwitang V tahun 2000. Sekolah Dasar di SD Pertiwi Bangdes pada tahun  
2006. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 166 Jakarta pada tahun 2009.  
Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 109 Jakarta pada tahun 2012. Penulis  
melanjutkan kuliah pada Jurusan Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah,  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SNMPTN Tulis  
(Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada tahun 2012.

Apabila terdapat kritik dan saran, silahkan dialamatkan pada penulis di  
[giovanironijeremy@gmail.com](mailto:giovanironijeremy@gmail.com) atau mengunjungi langsung pada alamat tertera  
diatas.